

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu Kementerian/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 55 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Jakarta, 06 Mei 2013**

**Badan Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Nasional**

**Plt. Kepala,**

**DR. Sudibyo Alimoeso, MA**  
**NIP.19551129 197902 1 001**

Kata Pengantar	
Pernyataan tanggung Jawab	
Daftar isi	
Daftar Tabel	
Ringkasan	
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	3
II. NERACA .....	4
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	6
A. PENJELASAN UMUM .....	6
A.1. DASAR HUKUM .....	6
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL .....	7
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....	9
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	16
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	16
B.2. Belanja Negara .....	22
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA .....	27
C.1. Aset Lancar .....	27
C.2. Aset Tetap .....	34
C.3. Piutang Jangka Panjang .....	51
C.4. Aset Lainnya .....	54
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	58
C.6. Ekuitas Dana Lancar .....	60
C.7. Ekuitas Dana Investasi .....	61
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA .....	62
D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA .....	62
D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK .....	62
D.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL .....	64
D.4. REKENING PEMERINTAH .....	64
D.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN .....	64
Laporan-laporan Pendukung	
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
Lampiran Tindak Lanjut Atas Temuan BPK	
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	

**DAFTAR TABEL**

tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 dan periode 1 Jan s/d 31 Des 2011 ...	1
tabel 2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 .....	2
tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA .....	6
tabel 4. Penggolongan Kualitas Piutang .....	15
tabel 5. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNPB .....	16
tabel 6. Perbandingan Realisasi PNPB Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 dan Periode 1 Jan s/d 31 Des 2011 .....	17
tabel 7. Rincian Anggaran & Realisasi Belanja Program Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 .....	23
tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 .....	23
tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 dan Periode 1 Jan s/d 31 Des 2011 .....	24
tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 dan Periode 1 Jan s/d 31 Des 2011 .....	24
tabel 11. Perbandingan Belanja Barang Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 dan Periode 1 Jan s/d 31 Des 2011 .....	25
tabel 12. Perbandingan Real Belanja Modal Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012 dan Periode 1 Jan s/d 31 Des 2011 .....	26
tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja .....	27
tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran .....	28
tabel 15. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja .....	28
tabel 16. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas .....	30
tabel 17. Rincian Penyetoran Kas di Kas Lainnya dan Setara Kas .....	30
tabel 18. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .....	32
tabel 19. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .....	34
tabel 20. Rincian Persediaan .....	34
tabel 21. Rincian Aset Tetap .....	35
tabel 22. Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah .....	35
tabel 23. Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin .....	37
tabel 24. Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin .....	41
tabel 25. Penambahan dan Pengurangan Nilai jalan, Irigasi dan Jaringan .....	45
tabel 26. Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya .....	47
tabel 27. Penambahan dan Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	50
tabel 28. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Satker .....	51
tabel 29. Mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Satker .....	51
tabel 30. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi .....	52
tabel 31. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang jangka panjang lainnya .....	54
tabel 32. Rincian Aset Lainnya .....	54
tabel 33. Rincian Aset tak Berwujud per Satker .....	55
tabel 34. Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tak Berwujud .....	55
tabel 35. Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Lain-lain .....	57
tabel 36. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga .....	59

**RINGKASAN**

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.924.115.160,- atau mencapai 65214,83 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp9.084.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 2.213.683.682.120,00 atau mencapai 97,41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.272.536.381.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011

	(dalam rupiah)			
	Periode 1 Jan s/d 31 Desember 2012		Periode 1 Jan s/d. 31 Desember 2011	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	9.084.000	5.924.115.160	9.624.000	2.623.753.908
Belanja Rupiah Murni	2.256.062.491.000	2.197.911.035.689	2.503.150.000.500	2.336.154.684.919
Belanja Pinjaman dan Hibah	16.473.890.000	15.772.646.431	18.254.126.000	17.147.670.626
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.272.536.381.000</b>	<b>2.213.683.682.120</b>	<b>2.521.404.126.500</b>	<b>2.353.302.355.545</b>

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 31 Desember 2012 dan Per 31 Desember 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 1.610.544.930.339,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 636.253.250.179,00, Aset Tetap sebesar Rp 944.773.377.927,00, Piutang Jangka Panjang Rp 1.340.514,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 29.516.961.719,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 3.823.690.394,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 1.606.721.239.945,00, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 632.429.559.785,00, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 974.291.680.160,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011

	(dalam rupiah)		Nilai kenaikan/ (penurunan)	
	Per 31 Des 2012	Per 31 Des' 2011	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	636,253,250,179	682,386,147,628	(46,132,897,449)	(6.76)
Aset Tetap	944,773,377,927	896,352,559,330	48,420,818,597	5.40
Aset Lainnya	29,516,961,719	19,839,398,477	9,677,563,242	48.78
Panjang	1,340,514	-	1,340,514	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,610,544,930,339</b>	<b>1,598,578,105,435</b>	<b>11,966,824,904</b>	<b>0.75</b>
<b>Kewajiban</b>				
Pendek	3,823,690,394	7,377,796,446	(3,554,106,052)	(48.17)
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	632,429,559,785	675,008,351,182	(42,578,791,397)	(6.31)
Ekuitas Dana Investasi	974,291,680,160	916,191,957,807	58,099,722,353	6.34
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>1,606,721,239,945</b>	<b>1,591,200,308,989</b>	<b>15,520,930,956</b>	<b>0.98</b>

## 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERIODE 1 JAN S/D 31 DES 2012 DAN PERIODE 1 JAN S/D 31 DES 2011

Uraian	Catatan	Periode 1 Jan s/d 31 Des'12			Periode 1 Jan s/d 31 Des'11
		Anggaran	Realisasi	%Realisasi terhadap anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	B.1				
1 Penerimaan Negara Bukan Pajak		9,084,000	5,924,115,160	65,214.83	2,623,753,908
<b>Jumlah Pendapatan</b>		9,084,000	5,924,115,160	65,214.83	2,623,753,908
<b>BELANJA</b>	B.2				
1 Belanja Pegawai	B.2.1	333,233,109,761	333,162,648,174	99.98	178,143,896,559
2 Belanja Barang	B.2.2	1,863,638,776,239	1,806,774,668,733	96.95	2,081,356,881,592
3 Belanja Modal	B.2.3	75,664,495,000	73,746,365,213	97.46	93,801,577,394
<b>Jumlah Belanja</b>		2,272,536,381,000	2,213,683,682,120	97.41	2,353,302,355,545

**II. NERACA****BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN PER 31 DESEMBER 2011**

(dalam Rp)

Nama Perkiraan	Catatan	PER 31 DES 2012	PER 31 DES 2011
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	3,678,008,618	6,972,725,190
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	6,253	6,253
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	143,063,977	367,839,400
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>		<b>3,821,078,848</b>	<b>7,340,570,843</b>
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.4	55,033,333	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	0	8,499,808,374
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	0	0
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.7	1,347,250	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	(6,736)	0
Persediaan	C.1.9	632,375,797,484	666,545,768,411
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>636,253,250,179</b>	<b>682,386,147,628</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1	366,783,710,993	376,910,735,193
Peralatan dan Mesin	C.2.2	298,558,585,479	261,094,306,212
Gedung dan Bangunan	C.2.3	239,433,632,412	230,581,555,126
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	17,278,957,020	15,278,142,051
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	4,153,389,332	3,916,407,657
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	18,565,102,691	8,571,413,091
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>944,773,377,927</b>	<b>896,352,559,330</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>C.3</b>		
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.3.1	1,347,250	0
Penyisihan piutang tidak tertagih-tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi	C.3.2	(6,736)	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3	8,499,808,374	
Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang jangka Panjang Lainnya	C.3.4	(8,499,808,374)	
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>1,340,514</b>	<b>0</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	21,769,745,654	17,073,786,308
Aset Lain-lain	C.4.2	7,747,216,065	2,765,612,169
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>29,516,961,719</b>	<b>19,839,398,477</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,610,544,930,339</b>	<b>1,598,578,105,435</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.5</b>		

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	144,198,073	223,609,345
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	3,678,008,618	6,972,725,190
Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.5.3	1,483,703	171,005,147
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	0	10,456,764
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>3,823,690,394</b>	<b>7,377,796,446</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>3,823,690,394</b>	<b>7,377,796,446</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	1,340,514	8,499,808,374
Cadangan Persediaan	C.6.2	632,375,797,484	666,545,768,411
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	(144,198,073)	(234,066,109)
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.4	141,586,527	196,840,506
Barang / Jasa yang harus diterima	C.6.5	55,033,333	
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>		<b>632,429,559,785</b>	<b>675,008,351,182</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	C.7		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	944,773,377,927	896,352,559,330
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	29,518,302,233	19,839,398,477
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>		<b>974,291,680,160</b>	<b>916,191,957,807</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>1,606,721,239,945</b>	<b>1,591,200,308,989</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1,610,544,930,339</b>	<b>1,598,578,105,435</b>

### III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

##### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan pembentukan Piutang Tak tertagih;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Formatted: Heading 1, Right

Formatted: Font: Arial, English (United Kingdom)

Formatted: Font: 8 pt, Not Bold, Font color: Blue

Formatted Table

Formatted: Font: Font color: Text 2, Indonesian

Formatted: Font: 8 pt, Swedish (Sweden)

Formatted: Font: Book Antiqua, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Heading 3, Left, Right: 0", Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Formatted: Font: Book Antiqua, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Book Antiqua, 12 pt, Not Bold, Swedish (Sweden)

Formatted: Heading 3, Right: 0", Line spacing: single

Formatted: Font: 8 pt, Swedish (Sweden)

- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
  19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-82/PB/2011 tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, No underline

## A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Formatted: Font: 8 pt, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Book Antiqua, 12 pt, Bold, Underline, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Left, Indent: Left: 0", Hanging: 0.33"

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: 8 pt

Rencana  
Strategis

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*) dan obyek (*human resources*) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (*life cycle approach*). Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: **Pertama** berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; **Kedua** berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; **Ketiga** adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; **Keempat** adalah data dan informasi penduduk; **Kelima** adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Pembangunan Kependudukan merupakan program lintas sektor, oleh sebab itu penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sektor harus menjadi perhatian

bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Sejak tidak adanya lembaga pemerintah yang menangani penyerasian kebijakan tersebut, banyak terjadi ketidaksielarasan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah di Indonesia, termasuk dalam penyediaan dan peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan serta pengarahan mobilitas penduduk.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan **transisi demografi**. Transisi demografi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan. Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut dengan **bonus demografi**. Bonus demografi ini merupakan **jendela peluang** (*Window of Opportunity*) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi atau jendela peluang tersebut diperkirakan akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2020-2025 (Proyeksi Penduduk berdasarkan SUPAS 2005), dengan syarat angka kelahiran dapat dikendalikan.

Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan KB (Pembangunan KKB), Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila: (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) pemberdayaan perempuan harus ditingkatkan untuk mendorong mereka memasuki pasar kerja sehingga dapat menambah tabungan keluarga.

Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertambahan dan pertumbuhan penduduk secara signifikan. Sejak Program KB Nasional dikembangkan tahun 1971 sampai dengan 2009, keberhasilannya diperkirakan telah mencegah lebih dari 100 juta kelahiran.

## Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Oleh karena itu, Program KB telah berhasil mengubah kondisi piramida penduduk Indonesia dari penduduk muda menuju penduduk dewasa.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Kantor Pembinaan Akuntansi  
Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkomitmen  
dengan Visi BKKBN adalah "**Penduduk Tumbuh Seimbang 2015**". Visi tersebut mengacu kepada fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan Visi misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah: **mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera**. Misi tersebut dilakukan melalui: penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; penetapan parameter penduduk; peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi; pengendalian penduduk dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta; mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk Menyelenggarakan Pembangunan Keluarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

### A.3.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2012 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BKKBN seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup BKKBN adalah 42 satker. Dari jumlah tersebut, yang

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Book Antiqua, 12 pt, Bold, Underline, Font color: Auto

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 42 satker (100%).

Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

IV. IV. IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED/UNAUDITED)

Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
		KP		KD		DK		TP		
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	9	-	32	-	1	-	-	-	42

Keterangan:  
M : Menyampaikan  
TM : Tidak Menyampaikan

- Formatted: Font color: Accent 5
- Formatted: Left, Line spacing: 1.5 lines
- Formatted Table
- Formatted: Font: 11 pt
- Formatted: Line spacing: 1.5 lines
- Formatted: Font: Arial, 11 pt

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

- Formatted: Font: Arial

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

- Formatted: Font: Book Antiqua, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Heading 3, Left, Line spacing: single
- Formatted: Font: Book Antiqua, Not Superscript/ Subscript, Not Highlight
- Formatted: Font: Book Antiqua
- Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Font: Arial, Swedish (Sweden), Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Font: 8 pt, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Font: 8 pt
- Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.01"
- Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Font: Arial

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagai berikut:

Pendapatan

**(1) Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

**(2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN.

Aset

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

**(3) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan menurut

Aset Lancar

pertambahan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

**a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan

Formatted: Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Light Blue

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Justified, Indent: Left: 0.26", No widow/orphan control

Formatted: Font: 8 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font color: Light Blue

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 8 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, No underline

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: No underline, Font color: Light Blue

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Not Bold, No underline, Indonesian

Formatted: Font: 8 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 8 pt

Formatted: Indonesian

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan harga yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Aset Tetap

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan

Formatted: Font: (Default) Arial, English (United States)

(+) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, rampasan,

Formatted: Indent: Left: 0.5", Hanging: 0.03", Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: No underline, Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Font color: Light Blue

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Piutang Jangka Panjang

**b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker pada 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: No underline, Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Font color: Light Blue

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratusribu rupiah);

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

(b)-(c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

### Piutang Jangka Panjang

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Arial, Indonesian

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue, English (United States)

### Aset Lainnya

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue, Not Superscript/ Subscript

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset TakBerwujud, dan Aset Lain-lain.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Aset Lainnya

kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Formatted: Font: (Default) Arial

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Light Blue

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, No underline

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, No underline, English (United States)

Kewajiban

**(2)4 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaian mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam kon pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan der pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan mer hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

a. Kewajiban Jangka Pendek

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial

b. Kewajiban Jangka Panjang

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, No underline

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

**(3)(5) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

**(4)(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Formatted: None, Indent: Left: 0.25", Space After: 0 pt, Line spacing: 1.5 lines, No bullets or numbering, Don't keep with next

tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Left: (No border)

Penyusutan Aset Tetap

**(5)(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap**

Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012, Badan

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ~~BPK-RI~~ belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Superscript/ Subscript

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah Rp.  
5.924.115.160,-

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**B.1 Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 5.924.115.160,00 atau mencapai 65214,83 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan Satker BKKBN Prov.Bengkulu dan Satker BKKBN Prov. Maluku sebesar Rp. 9.084.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

tabel 5. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

No.	URAIAN	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen	-	Rp 450,000	0
2	Pendapatan Penjualan Lainnya	-	Rp 55,183,000	0
3	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	Rp 81,267,000	0
4	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	-	Rp 271,846,050	0
5	Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan	Rp 3,084,000	Rp 1,632,317,066	52928.56894
6	Pendapatan sewa peralatan dan	Rp 6,000,000	Rp 79,066,253	1317.770883
7	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (jasa giro)	-	Rp 25,349,218	0
8	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	Rp 207,275,477	0
9	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	Rp 292,031,597	0
10	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	Rp 2,324,209,273	0
11	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj.LN TAYL	-	Rp 19,730,500	0
12	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara	-	Rp 187,181,730	0
13	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yg tdk diambil oleh	-	Rp 3,915,000	0
14	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	Rp 573,294,102	0
15	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral	-	Rp 170,998,894	0
	<b>JUMLAH PNBP</b>	<b>Rp 9,084,000</b>	<b>Rp 5,924,115,160</b>	<b>65,214.83</b>

Realisasi PNBP Lainnya Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.300.361.252,00 atau 125,79 persen dibandingkan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011.

Realisasi PNBP Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini:

tabel 6. Perbandingan Realisasi PNBP Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

No.	URAIAN	Periode 1 Jan'2012 s/d. 31 Des'2012	Periode 1 Jan'2011 s/d. 31 Des'2011	naik/ (Turun)	%Naik / Turun
1	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen	Rp 450,000	-	Rp 450,000	0
2	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	-	-	-	0
3	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta	-	Rp 24,740,000	(24,740,000)	-100
4	Pendapatan Penjualan Lainnya	Rp 55,183,000	Rp 13,798,000	Rp 41,385,000	299.93
5	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor, Rumah, Gedung, Bangunan dan tanah	-	Rp 92,700,000	(92,700,000)	-100
6	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor	-	Rp 32,280,000	(32,280,000)	-100
7	Pendapatan Penjualan Aset lainnya yg berlebih/rusak/dihapuskan	-	Rp 454,815,000	(454,815,000)	-100
8	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 81,267,000	-	Rp 81,267,000	0
9	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 271,846,050	-	Rp 271,846,050	0
10	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	-	Rp 53,849,604	(53,849,604)	-100
11	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan & Gudang	Rp 1,632,317,066	Rp 256,121,321	Rp 1,376,195,745	537.32
12	Pendapatan Sewa Peralatan dan mesin	Rp 79,066,253	-	Rp 79,066,253	0
13	Pendapatan Jasa Lembaga keu (Jasa Giro)	Rp 25,349,218	Rp 62,907,342	(37,558,124)	-59.70
14	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	-	Rp 10,000,000	(10,000,000)	-100
15	Pendapatan Bea Lelang	-	-	-	0
16	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 207,275,477	Rp 12,372,887	Rp 194,902,590	1575.24
17	Pendapatan bunga lainnya	-	-	-	0
18	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	Rp 292,031,597	Rp 158,121,981	Rp 133,909,616	84.69
19	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RMTAYL	Rp 2,324,209,273	Rp 628,736,980	Rp 1,695,472,293	269.66
20	Penerimaan kembali Belanja lainnya TAYL	-	Rp 148,229,150	(148,229,150)	-100
21	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL	Rp 19,730,500	-	Rp 19,730,500	0
22	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara	Rp 187,181,730	Rp 204,676,970	(17,495,240)	-8.55
23	Pendapatan dari Penutupan rekening	-	Rp 739,379	(739,379)	-100
24	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yg tdk diambil oleh yg berhak	Rp 3,915,000	-	Rp 3,915,000	0
25	Penerimaan kembali persekot uang muka gaji	-	Rp 658,750	(658,750)	-100
26	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp 573,294,102	Rp 469,006,544	Rp 104,287,558	22.24
27	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Terencana Multilateral	Rp 170,998,894	-	Rp 170,998,894	0
	<b>JUMLAH PNBP</b>	<b>Rp 5,924,115,160</b>	<b>Rp 2,623,753,908</b>	<b>Rp 3,300,361,252</b>	<b>125.79</b>

Kenaikan pendapatan tersebut dikarenakan adanya :

1. Pendapatan penjualan dokumen pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 450.000,-.
2. Pendapatan Penjualan Lainnya pada satker KBKR sebesar Rp. 50.000.000,-

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

dan pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat 5.183.000,-.

3. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 81.267.000,-
4. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya terdiri dari :

No	Satker	Pendapatan
1	Jawa Barat	3,400,000
2	Jawa Timur	37,800,000
3	Kalimantan Barat	1,600,000
4	Kalimantan Tengah	157,300,000
5	Kalimantan Selatan	29,300,000
6	Kalimantan Timur	10,046,050
7	Papua	32,400,000
	Total Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	271,846,050

5. Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang sebesar Rp. 1.632.317.066,- terdiri dari :

No	Satker	Pendapatan
1	SESTAMA	1,585,875,743
2	Jawa Barat	518,650
3	Jawa Tengah	1,568,900
4	Jawa Timur	9,633,800
5	DI. Yogyakarta	716,463
6	Sumatera Utara	624,000
7	Sumatera Barat	256,800
8	R i a u	1,606,400
9	Jambi	1,282,505
10	Sumatera Selatan	362,430
11	Lampung	1,996,068
12	Kalimantan Barat	1,925,380
13	Kalimantan Tengah	1,263,864
14	Kalimantan Selatan	991,500
15	Kalimantan Timur	4,067,720
16	Sulawesi Utara	252,250
17	Sulawesi Tengah	4,050,000
18	Sulawesi Tenggara	3,604,470
19	Maluku	119,700
20	B a l i	1,944,000
21	Nusa Tenggara Timur	355,300
22	Papua	1,993,548
23	Bengkulu	7,037,575
24	Gorontalo	270,000
	Total Pendapatan Sewa gedung, bangunan dan gudang	1,632,317,066

Kenaikan pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang salah satunya dikarenakan adanya pendapatan sewa gedung dan bangunan GHGK sebesar Rp. 1.325.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

TGL. DOK	NO DOK	JUMLAH
3/2/2012	203081511000513	150,000,000
8/2/2012	0910061404110706	100,000,000
23/02/2012	1000010106070007	470,000,000
15/10/2012	1314090513081410	30,000,000
7/11/2012	1303071402021115	25,000,000
20/12/2012	0201050310001103	550,000,000
<b>Jumlah setoran GHGK</b>		<b>1,325,000,000</b>

6. Pendapatan Sewa Peralatan dan mesin pada satker Perwakilan BKKBN Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sebesar Rp. 79.066.253,-.
7. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp. 207.275.477,- terdiri dari :

No.	Satker	Pendapatan
1	SESTAMA	15,552,675
2	KBKR	46,463,098
3	DITVOK	250,000
4	Jawa Timur	94,332,245
5	Sumatera Utara	17,292,550
6	Sumatera Barat	1,765,210
7	Kalimantan Barat	2,474,952
8	Sulawesi Tengah	19,271,564
9	Banten	9,480,000
10	Gorontalo	393,183
Jumlah Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah		207,275,477

8. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL sebesar Rp. 292.031.597,- terdiri dari :

No.	Satuan Kerja	423911
1	SESTAMA	178,331,576
2	Jawa Barat	40,342,745
3	Jawa Tengah	1,701,853
4	DI. Yogyakarta	12,117,179
5	Jawa Timur	60
6	Nanggroe Aceh Darussalam	420,340
7	Sumatera Utara	22,488,306
8	Sumatera Barat	163
9	R i a u	18
10	Jambi	3,325,423
11	Kalimantan Barat	309,000
12	Kalimantan Tengah	57,060
13	Kalimantan Selatan	267
14	Sulawesi Utara	110
15	Sulawesi Tengah	4,731,600
16	Sulawesi Selatan	11,777,557
17	Maluku	249,900
18	B a l i	291
19	Nusa Tenggara Timur	12
20	Papua	261
21	Bengkulu	782
22	Banten	167,000
23	Bangka Belitung	89
24	Gorontalo	11,039,005
25	Kepulauan Riau	4,705,000
26	Sulawesi Barat	266,000
<b>Jumlah</b>		<b>292,031,597</b>

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

9. Pendapatan penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL sebesar Rp. 2.324.209.273,- terdiri dari :

No.	satker	pendapatan
1	SESTAMA	6,932,300
2	KBKR	36,733,513
3	LATBANG	149,671,950
4	ADPIN	497,500
5	DALDUK	195,896,855
6	Jawa Tengah	8,105,900
7	DI. Yogyakarta	105,000
8	Sumatera Barat	103,282,550
9	R i a u	19,132,000
10	Sumatera Selatan	137,843,600
11	Kalimantan Barat	638,400
12	Kalimantan Tengah	2,880,000
13	Kalimantan Selatan	541,832,900
14	Sulawesi Utara	16,508,900
15	Sulawesi Tengah	545,000
16	Sulawesi Selatan	260,518,105
17	Sulawesi Tenggara	287,626,800
18	Maluku	14,957,500
19	Nusa Tenggara Timur	295,212,150
20	Papua	205,513,100
21	Bangka Belitung	26,750,250
22	Gorontalo	7,590,000
23	Papua Barat	5,340,000
24	Sulawesi Barat	95,000
	JUMLAH	2,324,209,273

10. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Sebesar Rp. 19.730.500,-

11. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara (TP/TGR) sebesar Rp. 187.181.730,- terdiri dari :

No.	Satuan Kerja	Pendapatan
1	Jawa Barat	11,341,090
2	DI. Yogyakarta	9,000,000
3	Jawa Timur	525,000
4	R i a u	11,320,550
5	Jambi	91,710,589
6	Lampung	43,239,961
7	Kalimantan Barat	2,000,000
8	Kalimantan Selatan	9,069,300
9	Kalimantan Timur	1,028,750
10	Sulawesi Utara	1,529,340
11	B a l i	76,950
12	Gorontalo	3,000,000
13	Kepulauan Riau	3,340,200
	JUMLAH	187,181,730

12. Pendapatan Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yg tdk diambil oleh yg berhak pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 3.915.000,00.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

13. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp. 573.294.102,00 terdiri dari:

No.	Satuan Kerja	423999
1	SESTAMA	24,221,490
2	Jawa Barat	1,479,989
3	Sumatera Utara	4,757,000
4	Sumatera Barat	349,436,170
5	Ri a u	555,000
6	Jambi	540,000
7	Sumatera Selatan	1,630
8	Lampung	175,727,179
9	Kalimantan Barat	6,154
10	Sulawesi Utara	15,669,340
11	Sulawesi Tengah	30,000
12	Nuta Tenggara Barat	490,050
13	Bengkulu	380,040
14	Papua Barat	60
15	Sulawesi Barat	-
	JUMLAH	573,294,102

14. Pendapatan Hibah Luar Negeri-Terencana Multilateral pada satker Puslitbang KB-KR sebesar Rp. 170.998.894,00 bersumber dari sisa saldo kas dana hibah USAID di rekening penampung Satker Puslitbang per 31 Desember 2011 pada Rekening Bank BNI No. 0192025311 an. Pro. Optimalisasi Pemanfaatan Data SDKI.

**B.2. Belanja Negara**

Realisasi belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 2.213.683.682,120 atau sebesar 97,41 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 2.272.536.381.000,- Anggaran dan realisasi belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Periode 1 Jan s/d 31 Des 2012

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja	%
068.01.01	Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya BKKBN	254,242,237,000	253,469,315,760	99.70
068.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	4,850,664,000	4,820,371,500	99.38
068.01.04	Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	75,627,105,000	73,444,329,023	97.11
068.01.06	Program Kependudukan dan KB	1,937,816,375,000	1,881,949,665,837	97.12
	JUMLAH	2,272,536,381,000	2,213,683,682,120	97.41

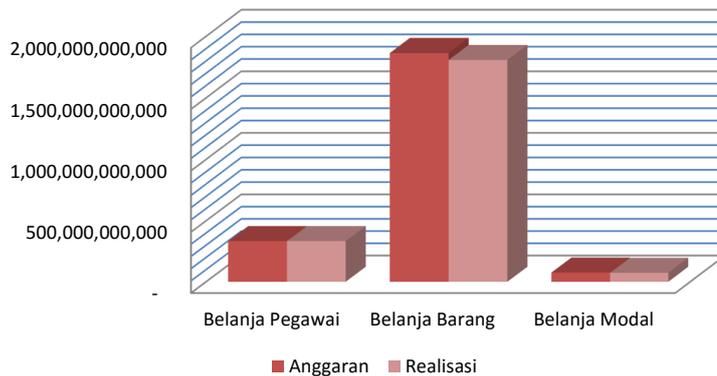
tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	333,233,109,761	333,162,648,174	99.98
52	Belanja Barang	1,863,638,776,239	1,806,774,668,733	96.95
53	Belanja Modal	75,664,495,000	73,746,365,213	97.46
	Jumlah	2,272,536,381,000	2,213,683,682,120	97.41

Realisasi Belanja Negara Rp. 139.618.673.425,-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012



Realisasi belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 139.618.673.425,00 atau 5,93 persen dibandingkan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 disebabkan karena adanya pemotongan belanja berdasarkan surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor 521/OT-102/B1/2012 tgl. 1

Belanja Pegawai Rp. 333.162.648.174,-

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Maret 2012 tentang pemotongan belanja Kementerian/Lembaga. Perbandingan realisasi belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		Periode 1 Jan s/d 31 Des'12	Periode 1 Jan s/d 31 Des'11	Rp	%
51	Belanja Pegawai	333.162.648.174	178.143.896.559	155.018.751.615,00	87,02
52	Belanja Barang	1.806.774.668.733	2.081.356.881.592	(274.582.212.859,00)	(13,19)
53	Belanja Modal	73.746.365.213	93.801.577.394	(20.055.212.181,00)	(21,38)
	Jumlah	2.213.683.682.120	2.353.302.355.545	(139.618.673.425,00)	(5,93)

B.2.1 Belanja Pegawai

Commented [O1]: Pengertian belanja pegawai

Realisasi belanja pegawai Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 333.162.648.174,- dan Rp 178.143.896.559,-. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 155.018.751.615,- atau 87,0 persen disebabkan adanya Tunjangan Kinerja Pegawai BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan BKKBN, Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Belanja Barang Rp.  
1.806.774.668.733,-

tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011

Uraian	Periode 1 Jan s/d 31 Des'12	Periode 1 Jan s/d 31 Des'11	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	129,387,589,090	121,477,584,640	7,910,004,450	6.5
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,404,149	3,343,979	(939,830)	(28.1)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	8,976,002,576	8,295,448,351	680,554,225	8.2
Belanja Tunj. Anak PNS	2,431,000,702	2,330,417,326	100,583,376	4.3
Belanja Tunj. Struktural PNS	12,101,130,000	11,764,655,000	336,475,000	2.9
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,476,650,000	2,534,469,000	(57,819,000)	(2.3)
Belanja Tunj. PPh PNS	4,954,453,028	4,185,527,728	768,925,300	18.4
Belanja Tunj. Beras PNS	7,108,878,710	7,475,938,220	(367,059,510)	(4.9)
Belanja Uang Makan PNS	18,022,934,000	12,956,560,000	5,066,374,000	39.1
Belanja tunjangan khusus papua PNS	545,055,000	561,600,000	(16,545,000)	(2.9)
Belanja Tunj. Lain-lain FNS	96,864,900	166,053,000	(69,188,100)	(41.7)
Belanja Tunj. Umum PNS	5,356,710,000	5,868,020,000	(511,310,000)	(8.7)
Belanja Uang Lembur	2,093,464,000	1,760,106,500	333,357,500	18.9
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Keg)	140,450,182,600	-	140,450,182,600	0.0
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>334,003,318,755</b>	<b>179,379,723,744</b>	<b>154,623,595,011</b>	<b>86.2</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	(840,670,581)	(1,235,827,185)	395,156,604	(32.0)
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>333,162,648,174</b>	<b>178,143,896,559</b>	<b>155,018,751,615</b>	<b>87.0</b>

**B.2.2 Belanja Barang**

Commented [O2]: Ditambahkan pengertiannya

Realisasi Belanja Barang Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah masing-masing sebesar Rp 1.806.774.668.733,00 dan Rp 2.081.356.881.592,00. Penurunan belanja barang sebesar Rp 274.582.212.859,00 atau minus 13,19 persen dikarenakan adanya adanya pemotongan belanja berdasarkan surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor 521/OT-102/B1/2012 tgl. 1 Maret 2012 tentang pemotongan belanja Kementerian/Lembaga. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Belanja Modal Rp.  
73.746.365.213,-

tabel 11. Perbandingan Belanja Barang Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011

Nama Perkiraan	Realisasi Periode 1 Jan'12 sd. 31 Des'12 (Rp.)	Realisasi Periode 1 Jan'11 sd. 31 Des' 2011 (Rp.)	Naik/(Turun)	% Naik / Turun
Belanja Barang Operasional	Rp 48,909,531,742	Rp 61,813,823,413	(12,904,291,671)	-20.88%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 1,340,779,134,553	Rp 1,488,782,106,617	(148,002,972,064)	-9.94%
Belanja Barang Penunjang dekon dan tgs pembantuan		Rp 11,414,521,815	(11,414,521,815)	0.00%
Belanja Jasa	Rp 100,552,629,739	Rp 93,619,925,620	Rp 6,932,704,119	7.41%
Belanja Pemeliharaan	Rp 27,440,828,925	Rp 29,664,808,130	(2,223,979,205)	-7.50%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 287,883,818,705	Rp 395,861,575,105	(107,977,756,400)	-27.28%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 2,036,091,235	Rp 1,691,995,759	Rp 344,095,476	20.34%
Belanja Peralatan dan mesin utk diserahkan masy/pemda	Rp 198,270,250	-	Rp 198,270,250	0.00%
Belanja barang lainnya utk diserahkan pd masy/pemda	Rp 77,149,000	-	Rp 77,149,000	0.00%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>Rp 1,807,877,454,149</b>	<b>Rp 2,082,848,756,459</b>	<b>(274,971,302,310)</b>	<b>-13.20%</b>
Pengembalian Belanja	(1,102,785,416)	(1,491,874,867)	Rp 389,089,451	-26.08%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>Rp 1,806,774,668,733</b>	<b>Rp 2,081,356,881,592</b>	<b>(274,582,212,859)</b>	<b>-13.19%</b>

**B.2.3 Belanja Modal**

Commented [O3]: Ditambahkan pengertiannya

Realisasi Belanja Modal Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 73.746.365.213,- dan Rp 93.801.577.394,-. Penurunan belanja modal sebesar Rp. 19.953.569.911,- atau minus 21,38 persen dikarenakan adanya pemotongan belanja berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor 521/OT-102/B1/2012 tgl. 1 Maret 2012 tentang pemotongan belanja Kementerian/Lembaga. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011

Nama Perkiraan	Realisasi Periode 1 Jan '12 s/d 31 Des '12	Realisasi Periode 1 Jan s/d 31 Des '11	Naik/Turun	% Naik / Turun
Belanja Modal Tanah	Rp 8,000,000	Rp 5,676,400	Rp 2,323,600	0.00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 50,640,061,230	Rp 78,373,320,814	(27,733,259,584)	-35.39%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 21,186,250,503	Rp 13,477,457,685	Rp 7,708,792,818	57.20%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 20,000,000	Rp 183,991,000	(163,991,000)	-89.13%
Belanja Modal Fisik Lainnya	-	Rp 1,770,011,495	(1,770,011,495)	-100.00%
Belanja Modal Lainnya	Rp 2,002,575,750	-	Rp 2,002,575,750	0.00%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>Rp 73,856,887,483</b>	<b>Rp 93,810,457,394</b>	<b>(19,953,569,911)</b>	<b>-21.27%</b>
Pengembalian Belanja	(110,522,270)	(8,880,000)		
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>Rp 73,746,365,213</b>	<b>Rp 93,801,577,394</b>	<b>(19,953,569,911)</b>	<b>-21.38%</b>

Formatted: Font: 8 pt

Formatted Table

Pendapatan

PENDAPATAN <KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGANAMA SATKER>

~~(((Diisi dengan nilai realisasi pendapatan dan diuraikan per jenis pendapatan: pendapatan pajak (khusus Departemen Kementerian Keuangan), pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah. Nilai realisasi pendapatan dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Uraikan juga penyebab kenaikan/penurunan realisasi pendapatan tersebut))))~~

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 0", Widow/Orphan control, Keep with next

**C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**

**C.1. Aset Lancar**

**C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.3.678.008.618,- dan Rp.6.972.725.190,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Uraian Satuan Kerja	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011	Kenaikan/Penurunan
1.	SESTAMA	Rp 884,219,650	Rp 533,141,950	Rp 351,077,700
2.	ADPIN	Rp 223,313,515	Rp 44,332,891	Rp 178,980,624
3.	KBKR	Rp 406,179,796	Rp 3,380,228,839	Rp (2,974,049,043)
4.	LATBANG	Rp 258,948,266	Rp 1,457,788,210	Rp (1,198,839,944)
5.	IRTAMA	Rp 30,292,500	Rp 96,141,400	Rp (65,848,900)
6.	DITVOKKOM	Rp 1,344,547,642	Rp 301,124,864	Rp 1,043,422,778
7.	PUSLITBANG	Rp 238,761,430	Rp 176,346,177	Rp 62,415,253
8.	KEPENDUDUKAN	Rp 90,555,319	Rp 389,652	Rp 90,165,667
9.	KSPK	Rp -	Rp 482,030,600	Rp (482,030,600)
10.	JATENG	Rp -	Rp 18,273	Rp (18,273)
11.	SULTENG	Rp -	Rp 29,572,000	Rp (29,572,000)
12.	SULTRA	Rp 47,690,500	Rp 13,960,800	Rp 33,729,700
13.	PAPUA	Rp -	Rp 94,921,350	Rp (94,921,350)
14.	BANTEN	Rp -	Rp 362,728,184	Rp (362,728,184)
15.	GORONTALO	Rp 153,500,000	Rp -	Rp 153,500,000
	<b>Total</b>	<b>Rp 3,678,008,618</b>	<b>Rp 6,972,725,190</b>	<b>Rp (3,294,716,572)</b>

Terdapat beberapa Satuan Kerja yang menyetorkan saldo Kas di Bendahara pengeluaran tersebut ke rekening Kas Negara setelah tanggal 31 Desember

2012 dengan rincian sebagai berikut (bukti terlampir):

tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian Satuan Kerja	Saldo per 31 Desember 2012	Penyetoran	Saldo
1.	SESTAMA	Rp 884,219,650	Rp 884,219,650	Rp -
2.	ADPIN	Rp 223,313,515	Rp 223,313,515	Rp -
3.	KBKR	Rp 406,179,796	Rp 406,179,796	Rp -
4.	LATBANG	Rp 258,948,266	Rp 258,948,266	Rp -
5.	IRTAMA	Rp 30,292,500	Rp 30,292,500	Rp -
6.	DITVOKKOM	Rp 1,344,547,642	Rp 1,344,547,642	Rp -
7.	PUSLITBANG	Rp 238,761,430	Rp 238,761,430	Rp -
8.	KEPENDUDUKAN	Rp 90,555,319	Rp 90,555,319	Rp -
9.	SULTRA	Rp 47,690,500	Rp 47,690,500	Rp -
10.	GORONTALO	Rp 153,500,000	Rp 153,500,000	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3,678,008,618</b>	<b>Rp 3,678,008,618</b>	<b>Rp -</b>

Kas di Bendahara  
Penerima Rp.6.253,-

### C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp.6.253,- dan Rp.6.253,- yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Jumlah tersebut terdiri dari:

tabel 15. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

No	Uraian Satuan Kerja	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011	Kenaikan/ Penurunan
1.	Sekretariat Utama	Rp 6,253	Rp 6,253	Rp -
	<b>Total</b>	<b>Rp 6,253</b>	<b>Rp 6,253</b>	<b>Rp -</b>

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut keseluruhannya belum disetor ke rekening Kas Negara, sehingga tidak ada perubahan dengan tahun anggaran yang lalu. Sisa tersebut tidak disetorkan supaya rekening bendahara penerima tidak ditutup.

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp.143.063.977,-

**C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.143.063.977,- dan Rp.367.839.400,- yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2011 tersebut di atas berasal dari :

- Sisa saldo kas dana hibah UNFPA di rekening penampung Satker Latbang per 31 Desember 2011 pada Rekening Bank BNI No. 0225253491 an. BKKBN – UNFPA sebesar  
 ..... Rp 500,698,541

Saldo cash on hand pada Bendahara Proyek sebesar ..... Rp 1,906,206

**TOTAL** sebesar ..... Rp 502,604,747

Sisa saldo yang sudah dikembalikan ke UNFPA pada tanggal 25-01-2012 sebesar ... Rp (305,764,241)

**Sisa Dana UNFPA yang akan diluncurkan pada Tahun 2012** ..... **Rp 196,840,506**
- Sisa saldo kas dana hibah USAID di rekening penampung Satker Puslitbang per 31 Desember 2011 pada Rekening Bank BNI No. 0192025311 an. Pro. Optimalisasi Pemanfaatan Data SDKI sebesar Rp. 170.999.000,- dan sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 170.998.894,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 tersebut diatas berasal dari :

1. Saldo kas dana hibah UNFPA di rekening penampung Satuan Kerja KBKR sebesar Rp. 141.586.527,- dimana peluncuran dana hibah UNFPA Tahun Anggaran 2012 ini terdapat pada Satuan Kerja KBKR. Berdasarkan SPHL No.243156Y/140/701 tanggal 31 Desember 2012 terinci sebagai berikut (dokumen SPHL terlampir):
  - Saldo Awal : Rp. 196.840.506,-
  - Pendapatan Hibah : Rp. 4.644.461.885,-
  - Belanja terkait Hibah : Rp. 4.699.715.864,-
  - Saldo Akhir : Rp. 141.586.527,-Perlu ditambahkan bahwa saldo awal peluncuran Hibah UNFPA Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) ini, berasal dari saldo akhir Hibah UNFPA Tahun anggaran 2011 pada satuan kerja Pelatihan dan Pengembangan Program yang dipindahkan pengelolaannya ke Satker KBKR.
2. Potongan pajak yang belum disetor dalam tahun berjalan pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi DI. Yogyakarta sebesar Rp. 1.477.450,- dan sudah disetor pada bulan Januari 2013 (bukti penyetoran di tahun 2013 atas pajak yang belum disetor terlampir)

tabel 16. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	Jumlah
1	Saldo akhir Hibah UNFPA di Satker KBKR	Rp 141.586.527
2	Pajak yang belum disetor di Satker DIY	Rp 1.477.450
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 143.063.977</b>

Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut hanya potongan pajak saja yang sudah disetor ke rekening Kas Negara, sedangkan sisa dana hibah luar negeri pada satker KBKR akan digulirkan/diluncurkan kembali pada tahun anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

tabel 17. Rincian Penyetoran Kas di Kas Lainnya dan Setara Kas

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

No	Uraian Satuan Kerja	Saldo per 31 Desember 2012	Penyetoran	Saldo
1	KBKR	Rp 141.586.527	Rp -	Rp 141.586.527
2	Perwakilan BKKBN Prov. DI. Yogyakarta	Rp 1.477.450	Rp 1.477.450	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 143.063.977</b>	<b>Rp 1.477.450</b>	<b>Rp 141.586.527</b>

Belanja Dibayar Dimuka  
(Prepaid) Rp.55.033.333

**C.1.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**

Saldo Kas pada Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.55.033.333,- dan Rp.0 yang merupakan pengeluaran belanja satuan kerja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa dan telah dibayarkan pada awal perikatan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran serta membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum sepenuhnya diterima/dinikmati satuan kerja.

Saldo belanja dibayar di muka per 31 Desember 2012 terdapat Satuan Kerja pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari :

- Saldo Belanja Sewa Dibayar Di Muka atas bangunan peruntukan Gudang Alkon di Jl. Ponegoro Mamuju mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan 27 Maret 2013 dengan nilai sewa Rp.7.500.000,- sesuai dengan perjanjian kontrak sewa No. 581/PPk-SC/BKKBN-SB/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;
- Saldo Belanja Sewa di bayar di muka Space Iklan ( Billboard ) Program KKB di Jl. Urip Sumoharjo Mamuju mulai tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan 02 Maret 2013 sebesar Rp.40.333.333,- dari total nilai sewa Rp.242.000.000 sesuai dengan perajjian Kontrak sewa No. 180/PAN/BKKBN-SB/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- Saldo Sewa Bangunan Peruntukan Sekretariat Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Jl. RE. Martadinata Mamuju mulai tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 13 April 2013 sebesar Rp.7.200.000,- dari total nilai sewa Rp.21.600.000,- sesuai dengan perjanjian Kontrak sewa No.509/PPK-MC/BKKBN-SB/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012

Piutang Bukan Pajak  
Rp.8.499.808.374,-

**C.1.5 Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.8.499.808.374,- yang merupakan piutang semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Mutasi piutang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>8,499,808,374</b>
Mutasi Kurang :	
- Piutang Jangka Panjang Lainnya	<b>(8,499,808,374)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>-</b>

Mutasi kurang tersebut merupakan perpindahan klasifikasi akun piutang bukan pajak menjadi akun piutang jangka panjang lainnya dikarenakan belum ditentukannya waktu jatuh tempo dari piutang tersebut.

**C.1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

**C.1.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.1.347.250,- dan Rp.0 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

tabel 18. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Barat	Rp 1.347.250
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.347.250</b>

Sedangkan mutasi Bagian Lancar TP/TGR pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp.0

Bagian Lancar TP TGR Rp.1.347.250,-

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Saldo per 31 Desember 2011	-
Mutasi tambah:	
- Bagian Lancar TGR pada Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Barat	Rp 1.347.250
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2012	Rp 1.347.250

Mutasi penambahan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp.1.347.250,- merupakan Bagian Lancar TGR pada Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Barat an. Iriyani, SE atas kehilangan Lap Top sesuai SK No.270/KU.702/J/2012 tanggal 10 Agustus 2012.

Berdasarkan SK Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat No.270/KU.702/J/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ditetapkan bahwa telah terjadi kehilangan Barang Milik Negara berupa sebuah Laptop Merk Axioo (pembelian tahun 2008) pada tanggal 21 Desember 2009 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian nomor STPL/701/B-1/XII/2009 yang menjadi tanggung jawab Sdri. Iriyani, SE. Atas kehilangan BMN tersebut didalam SK juga ditetapkan harga Tuntutan Ganti Ruginya sebesar Rp.4.694.500,-.

Menunjuk pada surat pernyataan sanggup membayar TGR atas kehilangan Laptop tersebut, telah dinyatakan bahwa Sdri. Iriyani, SE sanggup membayar TGR sebesar Rp.4.694.500,- dengan cara menyetor tunai ke Kas Negara sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya dicicil selama 24 bulan melalui pemotongan gaji pada pembuat daftar gaji.

Sehingga atas sisanya tersebut (Rp.2.694.500,-) dapat dikategorikan bahwa pada 12 bulan pertama nilai sisa TGRnya yang sebesar Rp.1.347.250,- merupakan piutang jangka pendek (bagian lancar tagihan TGR) dan pada 12 bulan kedua nilai sisa sebagiannya lagi yang sebesar Rp.1.347.250,- merupakan piutang jangka panjang lainnya (telah dijelaskan pada butir C.3.1 dan C.3.2)

**C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar minus Rp.6.736,- dan Rp. 0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR minus Rp.6.736,-

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk debitur yang tersebut pada tabel 18 :

tabel 19. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	1.347.250	-0,50%	(6.736)
<b>Total</b>			<b>1.347.250</b>		<b>(6.736)</b>

Persediaan  
Rp.632.375.797.484,-

### C.1.9 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp.632.375.797.484,00 dan Rp.666.545.768.411,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

tabel 20. Rincian Persediaan

No. Akun	Uraian	Per 31 Desember 2012	per 31 Desember 2011
1	Barang Konsumsi	Rp 1,489,616,758	Rp 1,439,572,360
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 39,765,000	Rp 36,670,000
3	Suku Cadang	Rp 742,261,846	Rp 967,899,884
4	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 12,952,519,536	Rp 20,707,029,840
5	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 39,924,500	Rp -
6	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 39,600,000	Rp -
7	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada	Rp 565,043,155,547	Rp 640,955,245,906
8	Bahan Baku	Rp 260,000	Rp 1,496,000
9	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	Rp 352,250,280	Rp 213,283,061
10	Persediaan Lainnya	Rp 51,676,444,017	Rp 2,224,571,360
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 632,375,797,484</b>	<b>Rp 666,545,768,411</b>

Aset Tetap  
Rp.944.773.377.927,-

### C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp. 944.773.377.927,00 dan Rp. 896.352.559.330,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

tabel 21. Rincian Aset Tetap

Uraian	Per 31 Desember 2012	Per 31 Desember 2011
Tanah	Rp 366.783.710.993	Rp 376.910.735.193
Peralatan dan Mesin	Rp 298.558.585.479	Rp 261.094.306.212
Gedung dan Bangunan	Rp 239.433.632.412	Rp 230.581.555.126
Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 17.278.957.020	Rp 15.278.142.051
Aset Tetap Lainnya	Rp 4.153.389.332	Rp 3.916.407.657
KDP	Rp 18.565.102.691	Rp 8.571.413.091
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 944.773.377.927</b>	<b>Rp 896.352.559.330</b>

**C.2.1 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.366.783.710.993,00 dan Rp.376.910.735.193,00. Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Modal (Pembuatan Sertifikat) Tanah (531114) sebesar Rp.8.000.000,- dengan perolehan tanah dari transaksi Pengembangan Nilai Aset Tanah sebesar Rp.8.000.000,-.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2012 disajikan dalam lampiran. Sedangkan penambahan dan pengurangan nilai Tanah adalah sebagai berikut:

tabel 22. Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp 376.910.735.193</b>
Mutasi tambah:	
- Pengembangan Nilai Aset	Rp 8.000.000
- Saldo Awal	Rp 18.900.000
- Reklasifikasi Masuk	Rp 118.274.800
- Perolehan Lainnya	Rp 706.800.000
- Hibah Masuk	Rp 82.485.000
Mutasi kurang:	
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(212.944.000)
- Koreksi Pencatatan	(9.805.000.000)
- Reklasifikasi Keluar	(1.043.540.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp 366.783.710.993</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan Tanah tersebut adalah berupa:

**Transaksi Penambahan :**

- Pengembangan Nilai Aset tanah pada Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo sebesar Rp.8.000.000,- merupakan pembuatan balik nama sertifikat tanah akibat adanya penambahan tanah dari hibah langsung Pemda Provinsi Gorontalo;
- Penambahan Saldo Awal berupa Penambahan Aset Tanah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi koreksi hasil inventarisasi dan Penilaian BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dengan KPKNL Bengkulu dengan BA-133/WKN.05/KNL.01/2012 tanggal 15 Oktober 2012. Tanah tersebut terletak di Jl. Beringin - Bengkulu dengan luas tanah 450m<sup>2</sup> sertifikat No. 5/PJ, dimana sebelumnya tercatat 1 m<sup>2</sup> seharusnya tercatat 450 m<sup>2</sup> setelah dikoreksi pencatatan 1 m<sup>2</sup> + 499 m<sup>2</sup> menjadi 450 m<sup>2</sup>, sehingga setelah verval terjadi penambahan senilai Rp. 18.900.000,-;
- Reklasifikasi Masuk merupakan koreksi atas luas tanah Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat yang semula dalam aplikasi terdaftar 750 m<sup>2</sup>, maka setelah terbitnya sertifikat yang sah atas tanah tersebut (diterbitkan menjadi dua sertifikat) maka dikoreksi menjadi senilai Rp.118.274.800,- :
  - KIB 2010101003.1, luasya 500 m<sup>2</sup> senilai Rp.74.200.000,-;
  - KIB 2010101003.2, luasya 297 m<sup>2</sup> senilai Rp.44.074.800,-;
- Penambahan Perolehannya Lainnya pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah yaitu adanya tukar guling tanah dengan pihak Rumah Sakit Banyumas yang terletak di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dengan nomor sertifikat 11.27.11.05.4.00009 tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp.706.800.000,-;
- Hibah Masuk pada Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo merupakan tambahan dari hibah langsung berupa tanah dari Pemda Provinsi Gorontalo, dengan Nomor Identifikasi Bidang Sertifikat Tanah: 30.05.02.08.4.00013 an. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia seluas 3.666 m<sup>2</sup>, beralamat di Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe, Ds. Toto Selatan, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango senilai Rp.82.485.000,-. Hibah langsung berupa tanah sesuai BAST Nomor: 05/HUKUM-ORG/BA/IV/2012 tanggal 23 April 2012.

**Transaksi Pengurangan :**

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Riau terdapat kesalahan input pada Semester II TA 2011 yang

### Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

awalnya diinput pada aset Tanah dan seharusnya di input pada gedung bangunan, namun pada Semester I TA 2012 telah dikoreksi dan dikembalikan diinput pada ke asset Gedung dan Bangunan senilai Rp.212.944.000,-;

- Koreksi Pencatatan pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur senilai Rp.9.738.000.000,- dan Kalimantan Tengah senilai Rp.67.000.000,-.
1. Pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, penurunan nilai tersebut disebabkan adanya mutasi/perubahan aset tetap berupa tanah sebesar Rp.9.738.000.000,- dengan NUP 03 di lokasi BALATBANG di Jalan Kalibokor Timur No.1 Surabaya, sesuai dengan arahan BKKBN Pusat pada saat Rekonsiliasi Nasional Semester I TA 2012 yang merupakan tindak lanjut hasil audit BPK bahwa tanah tersebut harus dikeluarkan dari aset Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur agar tidak terjadi pencatatan ganda. Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Kementerian Kesehatan, dan masih dalam proses pengurusan melalui BKKBN Pusat untuk menjadi milik Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur;
  2. Pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, tanah lapangan parkir konstruksi aspal seluas 162 m2 senilai Rp.67.000.000,- di lakukan koreksi pencatatan menjadi reklasifikasi masuk jalan dan jembatan senilai Rp.67.000.000,-;
  - Reklasifikasi Keluar senilai Rp.1.043.540.000,- terdiri dari :
    1. Koreksi atas luas tanah Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat sebelum diterbitkannya sertifikat yang sah, dimana dalam aplikasi terdaftar tanah seluas 750 m2 senilai Rp. 111.300.000,-;
    2. Reklas keluar tanah bangunan rumah negara Golongan I menjadi PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) senilai Rp.932.240.000,- pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

Peralatan dan Mesin  
Rp.298.558.585.479,-

#### **C.2.2 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.298.558.585.479,00 dan Rp.261.094.306.212,00.

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

tabel 23. Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp</b>	<b>261.094.306.212</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
- Pembelian	Rp	23.789.624.520
- Pengembangan nilai aset	Rp	334.795.150
- Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	Rp	19.599.593.355
- Penambahan Saldo Awal	Rp	2.706.707.361
- Transfer masuk	Rp	12.170.846.965
- Reklasifikasi Masuk	Rp	1.062.409.200
- Pembatalan Penghapusan	Rp	194.300.000
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	2.047.090.050
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset		
- Penghentian Aset dari Penggunaan		
<b>Mutasi kurang:</b>		
- Transfer Keluar		(12.314.731.010)
- Koreksi Pencatatan		(2.137.474.542)
- Penghentian aset dari penggunaan		(8.662.146.509)
- Reklasifikasi Keluar		(1.026.497.200)
- Penghapusan		(73.464.800)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset		(286.274.243)
- Penghapusan semu karena reklas dari intra ke ekstra/sebaliknya		(149.000)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	59.649.970
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp</b>	<b>298.558.585.479</b>

transaksi penambahan peralatan dan mesin per satker dapat dijelaskan sebagai berikut :

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

NO	SATUAN KERJA	SALDO AWAL	PEMBELIAN	TRANSFER MASUK	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP	PEMBATALAN PENGHAPUSAN	REKLASIFIKASI MASUK	REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP	PENGEMBANGAN NILAI ASET
1	SESTAMA	26,196,000	2,911,403,850		9,198,450,855			185,703,650	
2	ADPIN		1,035,295,204				64,460,000	6,450,000	
3	KBKR		52,200,000	94,160,000					
4	KSPK		39,325,000						
5	LATBANG		49,010,500	89,540,000					
6	IRTAMA			82,390,000					
7	DITVOK		918,608,300		10,092,142,500				
8	PUSLITBANG		73,810,000	47,080,000					
9	KEPENDUDUKAN		302,195,500	131,560,000			44,122,200		
10	JABAR		641,231,775	112,370,610			38,480,000		
11	JATENG		783,530,250	53,475,675					
12	DIY		709,221,000	8,711,175			1,900,000		
13	JATIM	527,359,136	985,599,500	8,711,175			90,640,000	1,428,427,250	
14	ACEH	697,088,825	966,295,850	961,475,295				2,000,000	
15	SUMUT		542,400,000	53,475,675		194,300,000			
16	SUMBAR		682,900,000	139,792,675				56,500,000	
17	RIAU		736,691,000	918,799,475			79,900,000		
18	JAMBI		518,840,000	948,140,830				14,984,000	
19	SUMSEL	1,365,890,000	635,047,000	973,710,375				26,097,500	
20	LAMPUNG		831,318,250	336,193,110			800,000		
21	KALBAR		548,532,000	928,945,875			3,850,000	85,761,800	
22	KALTENG		4,810,000	928,945,875			750,400,000		
23	KALSEL		544,550,750	67,606,110					
24	KALTIM		738,625,000	951,328,095			33,027,000	15,370,000	
25	SULUT	4,523,400	483,562,500	8,711,175					
26	SULTENG		613,050,000	8,711,175			16,730,000		
27	SULSEL		950,287,500	987,840,810				40,310,000	
28	SULTRA		545,468,000	1,020,370,230					
29	MALUKU		519,330,000	951,328,895					
30	BALI		608,113,850	78,820,610			3,500,000		
31	NTB	36,000,000	661,556,000	8,711,175					
32	NTT		265,707,250	8,711,175			300,917,000		
33	PAPUA		528,060,900	41,240,595					
34	BENGKULU		320,000,000	41,240,595					
35	MALUT		326,770,000	41,240,595			14,500,000		
36	BANTEN		765,324,491	41,240,595				2,750,000	
37	BABEL		388,732,800	961,475,295			700,000		
38	GORONTALO		423,913,500	41,240,595					
39	KEPRI		188,430,000	30,397,455	309,000,000				
40	PAPBAR	49,650,000	354,835,000	54,442,795			136,014,000		
41	SULBAR		595,042,000	8,711,175					
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,706,707,361</b>	<b>23,789,624,520</b>	<b>12,170,846,965</b>	<b>19,599,593,355</b>	<b>194,300,000</b>	<b>1,062,409,200</b>	<b>2,047,090,050</b>	<b>334,795,150</b>

transaksi pengurangan peralatan dan mesin per satker dapat dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

NO	SATUAN KERJA	KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS	KOREKSI NILAI TIM PENERTIBAN ASET	PENGHAPUSAN	TRANSFER KELUAR	REKLASIFIKASI KELUAR	KOREKSI PENCATATAN	PENGHAPUSAN SEMU KARENA REKLAS DARI EKSTRA KE INTRA/SEBALIKNYA	PENGHENTIAN ASET DARI PENGUNAAN
1	SESTAMA				(3,003,064,910)		(1,099,831,842)		(978,027,625)
2	ADPIN					(64,460,000)			
3	DITVOK				(9,311,666,100)				
4	PUSLITBANG								
5	KEPENDUDUKAN					(44,122,200)			
6	JABAR			(8,148,800)					(50,440,005)
7	JATENG			(43,654,000)					(143,998,000)
8	DIY	14,755,000	(115,000)			(1,900,000)			(31,500,000)
9	JATIM	427,011	66,500,000			(90,640,000)	(834,680,000)		(1,713,712,250)
10	ACEH	3,169,000	(1,961,000)						
11	SUMUT	35,000	(169,000)						(217,227,000)
12	SUMBAR	5,163,908	(526,544,000)				(149,000)		(187,975,100)
13	RIAU	(81,495,000)							(159,800,000)
14	JAMBI	77,944,400							(286,844,582)
15	SUMSEL	846,000	177,823,800						(799,353,436)
16	LAMPUNG					(1,018,000)			
17	KALBAR								(668,998,800)
18	KALTENG	8,000,000				(758,400,000)			(737,369,900)
19	KALSEL			(19,962,000)					
20	KALTIM	(39,819,184)	47,665,983			(31,227,000)			(206,291,000)
21	SULUT								(357,735,600)
22	SULTENG	47,575,000				(16,730,000)			(467,747,500)
23	SULSEL			(1,700,000)					(202,577,000)
24	SULTRA	(24,241,850)					(26,196,000)		
25	MALUKU	53,567,005	(50,707,005)						(101,000,000)
26	BALI		18,795,000			(3,500,000)	(11,214,500)		(38,000,000)
27	NTB								
28	NTT								(392,877,300)
29	PAPUA	7,509,100							(224,283,985)
30	BENGKULU	(9,000,000)	1,414,000						
31	MALUT		(21)			(14,500,000)			(58,806,308)
32	BANTEN								(120,096,000)
33	BABEL								(81,663,200)
34	GORONTALO		(18,977,000)						
35	KEPRI						(108,000,000)		
36	PAPBAR						(57,552,200)		(325,176,800)
37	SULBAR	(4,785,420)							(110,645,118)
	<b>JUMLAH</b>	<b>59,649,970</b>	<b>(286,274,243)</b>	<b>(73,464,800)</b>	<b>(12,314,731,010)</b>	<b>(1,026,497,200)</b>	<b>(2,137,474,542)</b>	<b>(149,000)</b>	<b>(8,662,146,509)</b>

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.239.433.632.412,- dan Rp.230.581.555.126,-.

Mutasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

tabel 24. Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp</b>	<b>230,581,555,126</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>		
- Penambahan Saldo Awal	Rp	88,715,999
- Pembelian	Rp	38,360,000
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	2,941,001,500
- Reklasifikasi Masuk	Rp	956,900,400
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	140,106,000
- Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	Rp	139,540,000
- Pengembangan nilai aset	Rp	4,829,471,713
<b>Mutasi Kurang :</b>		
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		(768,421,996)
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	561,645,087
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	53,675,000
- Pengembangan melalui KDP	Rp	4,205,447,980
- Penghapusan		(81,400,000)
- Reklasifikasi Keluar		(886,744,400)
- Koreksi Pencatatan		(2,936,839,997)
- Penghentian aset dari penggunaan		(429,380,000)
<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp</b>	<b>239,433,632,412</b>

Transaksi penambahan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Satuan Kerja	Saldo Awal	Pembelian	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Reklasifikasi Masuk	Penyelesaian Pembangunan langsung	Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	Pengembangan nilai aset
SESTAMA							475,552,113
Jawa Barat						88,200,000	
Jawa Tengah	43,715,999			114,500,000			
DI. Yogyakarta					48,000,000		
Jawa Timur		38,360,000					957,523,000
Aceh							30,000,000
Sumatera Barat							
R i a u			231,244,000				
Jambi				52,470,000			149,325,000
Sumatera Selatan				6,951,000			122,159,000
Lampung							172,100,000
Kalimantan Barat							259,092,000
Kalimantan Tengah							
Kalimantan Selatan			417,632,000				
Kalimantan Timur	45,000,000		590,823,000				19,750,000
Sulawesi Utara				497,552,400			59,125,600
Sulawesi Tengah				53,617,000			231,920,000
Sulawesi Selatan				40,840,000			422,043,000
Sulawesi Tenggara							373,970,000
Maluku							148,900,000
B a l i						51,340,000	65,509,000
NTB			331,107,000				
Papua				190,970,000			
Bengkulu							1,140,251,000
Maluku Utara			521,132,000		92,106,000		
Banten							148,250,000
BABEL			182,150,000				
Gorontalo							
Sulawesi Barat			666,913,500				54,002,000
<b>TOTAL</b>	<b>88,715,999</b>	<b>38,360,000</b>	<b>2,941,001,500</b>	<b>956,900,400</b>	<b>140,106,000</b>	<b>139,540,000</b>	<b>4,829,471,713</b>

Transaksi pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Satuan Kerja	Koreksi Pencatatan Nilai/kuantitas	Koreksi nilai Tim Penertiban aset	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Pengembangan melalui KDP	Penghapusan	Reklasifikasi Keluar	Koreksi Pencatatan	Penghentian aset di penggunaan
SESTAMA		(33,548,460)		1,008,392,000				
Jawa Barat								
Jawa Tengah		400						
DI. Yogyakarta	(1,283,336,000)	1,332,086,000						
Jawa Timur	50,548,001				(81,400,000)		(2,936,839,997)	(9,900,000)
Aceh		(80,000,000)						
Sumatera Barat	337,319,000		53,675,000	277,870,950				
R i a u	212,944,000							
Jambi	4,440,000			149,200,000		(52,470,000)		
Sumatera Selatan						(51,295,000)		
Lampung								
Kalimantan Barat				348,704,000				
Kalimantan Tengah				482,332,000				
Kalimantan Selatan								
Kalimantan Timur				200,000,000				
Sulawesi Utara				443,317,400		(497,552,400)		
Sulawesi Tengah						(53,617,000)		
Sulawesi Selatan						(40,840,000)		
Sulawesi Tenggara								
Maluku	(90,336,997)	65,399,997		198,184,000				
B a l i				242,711,000				
NTB								
Papua				713,285,630		(190,970,000)		(419,480,000)
Bengkulu		(722,292,850)						
Maluku Utara								
Banten								
BABEL								
Gorontalo				141,451,000				
Sulawesi Barat								
<b>TOTAL</b>	<b>(768,421,996)</b>	<b>561,645,087</b>	<b>53,675,000</b>	<b>4,205,447,980</b>	<b>(81,400,000)</b>	<b>(886,744,400)</b>	<b>(2,936,839,997)</b>	<b>(429,380,000)</b>

Realisasi Belanja Modal (MAK 53) dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2012 terdiri dari penggunaan MAK 533 dan MAK 532 dengan total nilai masing-masing sebesar Rp.21.186.250.503,- dan Rp.33.660.000,- yang mencakup : Belanja Modal Gedung dan Bangunan (MAK 533111) senilai Rp.5.275.620.000,-, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (MAK 533115) senilai Rp.60.823.0000,-, Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan (MAK 533116) senilai Rp.450.000,-, Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (MAK 533121) senilai Rp.15.849.357.503,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) senilai Rp.33.660.000,-.

Dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2012, selain menggunakan Belanja Modal MAK 53, juga menggunakan Belanja Operasional MAK 52 yaitu Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (MAK 523111) sebesar Rp.172.100.000,-.

Rincian peruntukkan aset atas masing-masing belanja modal diuraikan pada tabel dibawah ini :

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

No.	Mata Anggaran	Uraian	Jumlah Peruntukan Aset			Jumlah Belanja
			pada akun Gedung dan Bangunan	pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan	pada akun Jalan, Irigasi dan Jaringan	
<b>BELANJA MAK 533</b>						
1.	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				<b>5,275,620,000</b>
		- Perolehan/Penambahan KDP	-	658,596,800	-	
		- Pengembangan KDP	-	4,491,917,200	-	
		- Pengembangan Nilai Aset	33,000,000	-	-	
		- Penyelesaian Pembangunan Langsung	92,106,000	-	-	
2.	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan				<b>60,823,000</b>
		- Perolehan/Penambahan KDP	-	36,223,000	-	
		- Pengembangan KDP	-	24,600,000	-	
3.	533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan				<b>450,000</b>
		- Biaya Pengurusan Perizinan (Sertifikat) Tanah Hibah	450,000	-	-	
4.	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan				<b>15,849,357,503</b>
		- Pembelian	38,360,000	-	89,949,310	
		- Pengembangan Nilai Aset	4,590,711,713	-	-	
		- Penyelesaian Pembangunan Langsung	48,000,000	-	-	
		- Koreksi Pencatatan Nilai atas Honor Pengembangan Aset	4,440,000	-	-	
		- Biaya Pengurusan Perizinan (Sertifikat) Tanah Hibah	7,543,000	-	-	
		- Perolehan/Penambahan KDP	-	1,310,738,150	-	
		- Pengembangan KDP	-	9,759,615,330	-	
		<b>JUMLAH BELANJA MODAL (MAK 533)</b>				<b>21,186,250,503</b>
<b>BELANJA MAK 532</b>						
5.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				<b>33,660,000</b>
		- Pengembangan Nilai Aset	33,660,000	-	-	
		<b>JUMLAH BELANJA MODAL (MAK 532)</b>				<b>33,660,000</b>
<b>BELANJA MAK 52</b>						
6.	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				<b>172,100,000</b>
		- Pengembangan Nilai Aset	172,100,000	-	-	
		<b>JUMLAH NON-BELANJA MODAL (MAK 52)</b>				<b>172,100,000</b>
		<b>JUMLAH PERUNTUKAN ASET</b>	<b>5,020,370,713</b>	<b>16,281,690,480</b>	<b>89,949,310</b>	<b>21,392,010,503</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan peruntukkannya, yaitu :

1. Realisasi Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp.33.000.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Belanja Modal MAK 533111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 533121;
2. Realisasi Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp.36.223.000,- dan Pengembangan KDP sebesar Rp.24.600.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menggunakan Belanja Modal MAK 533115, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 533111;
3. Realisasi Pengurusan Perizinan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Hibah sebesar Rp.7.993.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Gorontalo menggunakan Belanja Modal MAK 533116 sebesar Rp.450.000,- dan Belanja Modal MAK 533121 sebesar Rp.7.543.000,-, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 531114.

Penjelasan mengenai adanya Tanah Hibah pada Satker Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo telah dijelaskan pada butir C.2.1 pada paragraph Transaksi Penambahan Hibah Masuk;

4. Realisasi Pembelian sebesar Rp.38.360.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggunakan Belanja Modal MAK 533121, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 533115, dimana transaksi tersebut sebenarnya digunakan untuk jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung Pusyan Gatra di Manukansenilai Rp.38.360.000,00 sesuai dengan kontrak nomor 1320/KU.807/JI/2012 tanggal 3 April 2012;
5. Realisasi Pembelian Jaringan sebesar Rp.89.949.310,- pada Satuan Kerja Sekretariat Utama menggunakan Belanja Modal MAK 533121, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 53413, meskipun sebenarnya jaringan yang dimaksud adalah instalasi jaringan listrik yang melekat pada gedung dan bangunan;
6. Realisasi Honor tenaga ahli atas pengembangan bangunan gedung pendidikan permanen Bidang Latbang sebesar Rp.4.440.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi tidak dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Gedung dan Bangunan meskipun menggunakan Belanja Modal MAK 53121, dikarenakan nilai tersebut belum mencapai nilai minimal kapitalisasi Aset Gedung dan Bangunan yang mengakibatkan adanya koreksi pencatatan nilai dalam aplikasi SIMAK BMN sebesar nilai tersebut;
7. Realisasi Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp.33.660.000,- pada Satuan Kerja Sekretariat Utama menggunakan Belanja Modal MAK 532111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 533121;
8. Realisasi Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp.172.100.000,- pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung menggunakan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) dan telah dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Gedung dan Bangunan meskipun menggunakan Belanja MAK 52, dikarenakan nilai tersebut sudah melebihi nilai minimal kapitalisasi Aset Gedung dan Bangunan. Meskipun begitu, memang idealnya menggunakan Belanja Modal MAK 533121.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp.17.278.957.020,-

**C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.17.278.957.020,00 dan Rp.15.278.142.051,00.

Mutasi jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

tabel 25. Penambahan dan Pengurangan Nilai jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp 15.278.142.051</b>
Mutasi tambah:	
- Pembelian (Jaringan)	Rp 196.528.310
- Pengembangan nilai aset (Jaringan)	Rp 109.120.000
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (Jaringan)	Rp 1.649.350.459
- Reklasifikasi Masuk (Jalan dan Jembatan)	Rp 67.000.000
- Transfer Masuk (Jaringan)	Rp 571.632.600
Mutasi kurang:	
- Transfer Keluar (Jaringan)	(571.632.600)
- Penghentian Aset dari Penggunaan (jaringan)	(21.183.800)
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp 17.278.957.020</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja	Pembelian	Transfer masuk	Reklasifikasi Masuk	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Pengembangan nilai aset	Transfer keluar	Penghentian aset dr penggunaan
SESTAMA	150,619,810			1,077,717,859			
DITVOK				571,632,600		(571,632,600)	
Jawa Timur	500,000						
Aceh		46,530,000					
Sumatera Utara	15,508,500						
R i a u		66,464,200					
Jambi		46,530,000					
Sumatera Selatan		46,530,000					(10,591,900)
Kalimantan Barat		46,530,000					(10,591,900)
Kalimantan Tengah		46,530,000	67,000,000				
Kalimantan Timur		66,464,200					
Sulawesi Selatan		46,530,000					
Sulawesi Tenggara		46,530,000			20,000,000		
Maluku		66,464,200					
BABEL	29,900,000	46,530,000					
Gorontalo					89,120,000		
<b>TOTAL</b>	<b>196,528,310</b>	<b>571,632,600</b>	<b>67,000,000</b>	<b>1,649,350,459</b>	<b>109,120,000</b>	<b>(571,632,600)</b>	<b>(21,183,800)</b>

*Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012*

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2012 :

No.	Uraian Peruntukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	Mata Anggaran Belanja Modal yang Digunakan					Jumlah peruntukkan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
		532111	533121	534161	536111	521219	
1.	Pembelian (Jaringan)	60,670,500	89,949,310	-	45,408,500	500,000	196,528,310
2.	Pengembangan Nilai Aset (Jaringan)	89,120,000	-	20,000,000	-	-	109,120,000
3.	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (Jaringan)	571,632,600	-	-	-	-	571,632,600
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>721,423,100</b>	<b>89,949,310</b>	<b>20,000,000</b>	<b>45,408,500</b>	<b>500,000</b>	<b>876,780,910</b>

Realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (MAK 534161) periode 1 Januari sd. 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.20.000.000,- yang merupakan belanja penambahan nilai jaringan. Terhadap penambahan perolehan dari pembelian dan penambahan nilai Aset Jalan, irigasi dan Jaringan, terdapat perbedaan/selisih antara lain:

1. Selisih sebesar Rp.196.528.310,- antara perolehan/pembelian jaringan senilai Rp.196.528.310,- dengan belanja modal perolehan/pembelian jaringan (MAK 534131) sebesar Rp.0,-.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pada :

- Satker Sekretariat Utama memiliki realisasi Pembelian Jaringan senilai Rp.150.619.810,- dimana terdapat ketidaksesuaian dengan menggunakan MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) sebesar Rp.60.670.500,- dan MAK 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) sebesar Rp.89.949.310,-;
- Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dan Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung, masing-masing satker memiliki realisasi Pembelian Jaringan senilai Rp.15.508.500,- dan Rp.29.900.000,-, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan menggunakan MAK 536111 (Belanja Modal Lainnya).
- Berdasarkan hasil koreksi BPK Satker Perwakilan BKKBN Jawa Timur terdapat kesalahan menggunakan MAK 521219 (Belanja Brang non operasional lainnya) untuk membeli aset berupa instalasi sebesar Rp. 500.000,-.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

2. Selisih sebesar Rp.89.120.000,- antara pengembangan nilai asset jaringan senilai Rp.109.120.000,- dengan belanja modal penambahan nilai asset jaringan (MAK 534161) sebesar Rp.20.000.000,-.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pada :

- Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo memiliki realisasi Pengembangan Nilai Aset Jaringan senilai Rp.89.120.000,-, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan menggunakan MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).

**C.2.5 Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.4.153.389.332,- dan Rp.3.916.407.657,- yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 disajikan dalam lampiran.

Mutasi Aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

tabel 26. Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp</b>	<b>3.916.407.657</b>
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	241.618.910
- Saldo Awal	Rp	1.500
- Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	Rp	434.201
-Reklasifikasi Masuk	Rp	8.850.000
Mutasi kurang:		
- Penghentian Aset dari Penggunaan		(5.072.936)
- Reklasifikasi Keluar		(8.850.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp</b>	<b>4.153.389.332</b>

Sedangkan penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Satuan Kerja	Pembelian	Saldo awal	Reklasifikasi Masuk	Reklasifikasi dr aset lainnya ke aset tetap	Reklasifikasi Keluar	Penghentian aset dr penggunaan
TOTAL	241,618,910	1,500	8,850,000	434,201	(8,850,000)	(5,072,936)
SESTAMA	9,900,000					
ADPIN	168,628,910					
Jawa Tengah	15,390,000					
Jawa Timur				434,201		(1,787,936)
Aceh	11,000,000					
Sumatera Utara						(25,000)
Sumatera Barat						(2,000)
Sumatera Selatan						(2,653,000)
Kalimantan Tengah	1,300,000					
Kalimantan Timur		1,500				
Sulawesi Selatan	8,850,000		8,850,000		(8,850,000)	
B a l i	3,750,000					
Papua						(605,000)
Banten	2,800,000					
Sulawesi Barat	20,000,000					

Realisasi Belanja Modal dalam rangka perolehan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sd. 31 Desember 2012 terdiri dari penggunaan MAK 532 dan MAK 536 dengan total nilai masing-masing sebesar Rp.58.240.000,- dan Rp.1.921.080.750,- yang mencakup : Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532111) sebesar Rp.58.240.000,- dan Belanja Modal Lainnya (MAK 536111) sebesar Rp.1.921.080.750,-.

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sd. 31 Desember 2012:

No.	Mata Anggaran	Uraian	Jumlah Peruntukkan Aset							Jumlah Belanja Modal	
			pada akun Aset Tetap Lainnya	pada akun Aset Tetap Tak Berwujud		pada akun Jalan, Irigasi dan Jaringan	pada akun Peralatan dan Mesin	KDP	Honor MAK 53 yg tidak dapat dikapitalisasi		Aset Ekstrakomptable
				Lisensi	Software						
<b>BELANJA MAK 532</b>											
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								2,096,335,846	
		- Pembelian	58,240,000	643,031,946	1,309,100,000	-	-	-	-		
		- Penyelesaian Pembangunan KDP	-	-	85,963,900	-	-	-	-		
		<b>JUMLAH BELANJA MODAL (MAK 532)</b>								<b>2,096,335,846</b>	
<b>BELANJA MAK 536</b>											
2.	536111	Belanja Modal Lainnya								1,921,080,750	
		- Pembelian	183,378,910	173,012,500	846,124,350	45,408,500	517,982,490	-	2,400,000	3,025,000	
		- Perolehan/Penambahan	-	-	-	-	-	50,150,100	-	-	
		- Pengembangan KDP	-	-	-	-	-	181,093,900	-	-	
		- Koreksi Pencatatan Nilai	-	-	-	-	(81,495,000)	-	-	-	
		<b>JUMLAH BELANJA MODAL (MAK 536)</b>								<b>1,921,080,750</b>	
		<b>JUMLAH PERUNTUKAN ASET</b>	<b>241,618,910</b>	<b>816,044,446</b>	<b>2,241,188,250</b>	<b>45,408,500</b>	<b>436,487,490</b>	<b>231,244,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>3,025,000</b>	<b>4,017,416,596</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat **ketidaksesuaian** antara belanja modal dengan peruntukannya, yaitu :

1. Diantara Realisasi Pembelian Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.58.240.000,- terdapat beberapa satuan kerja menggunakan Belanja Modal MAK 532111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 536111, diantaranya:
  - Satker Sekretariat Utama : Rp. 9.900.000,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Tengah : Rp. 15.390.000,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Tengah : Rp. 1.300.000,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Selatan : Rp. 8.850.000,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Banten : Rp. 2.800.000,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Barat : Rp. 20.000.000,-
2. Realisasi Pembelian Jaringan sebesar Rp.45.408.500,- terdapat 2 (dua) satuan kerja yang menggunakan Belanja Modal MAK 536111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 534131, diantaranya :
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Utara : Rp. 15.508.500,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Bangka Belitung : Rp. 29.900.000,-
3. Realisasi Pembelian Peralatan Mesin sebesar Rp.517.982.490,- terdapat beberapa satuan kerja yang menggunakan Belanja Modal MAK 536111, dimana seharusnya menggunakan Belanja Modal MAK 532111, diantaranya :
  - Satker Deputi Advokasi, Penggerakkan dan Informasi : Rp. 188.214.240,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Aceh : Rp. 5.990.000,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Riau : Rp. 220.500.000,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Selatan : Rp. 28.800.000,-
  - Satker Perwakilan BKKBN Prov. Lampung : Rp. 74.478.250,-

Konstruksi dalam  
Pengerjaan  
Rp.18.565.102.691,-

#### **C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.18.565.102.691,- dan Rp.8.571.413.091,-.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 disajikan dalam lampiran.

Sedangkan MUTASI Konstruksi Dalam Pengerjaan PER 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

tabel 27. Penambahan dan Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>8.571.413.091</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
- Perolehan/Penambahan KDP	7.001.950.770
- Pengembangan dengan KDP	32.530.147.338
<b>Mutasi Kurang :</b>	
- Koreksi Nilai KDP	(38.102.064)
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(29.500.306.444)
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>18.565.102.691</b>

Penambahan dan pengurangan Konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja	Saldo Awal	Perolehan/penambahan KDP	Pengembangan dg KDP	Koreksi nilai KDP	Reklasifikasi KDP jd brg jadi	Saldo Akhir
SESTAMA		2,897,732,420	10,071,084,208	(38,102,064)	(12,303,509,964)	
DITVOK		2,149,947,800	8,599,791,200		(10,749,739,000)	
Jawa Tengah		49,800,000	4,045,898,000			
Sumatera Barat		56,202,500	221,668,450		(277,870,950)	
R i a u		50,150,100	181,093,900		(231,244,000)	
Jambi		10,620,000	138,580,000		(149,200,000)	
Kalimantan Barat		25,200,000	323,504,000		(348,704,000)	
Kalimantan Tengah		122,730,000	359,602,000		(482,332,000)	
Kalimantan Selatan		22,855,650	394,776,350		(417,632,000)	
Kalimantan Timur		496,373,000	294,450,000		(790,823,000)	
Sulawesi Utara		136,076,400	307,241,000		(443,317,400)	
Maluku		188,274,800	9,909,200		(198,184,000)	
B a l i		72,813,300	169,897,700		(242,711,000)	
NTB		16,588,000	314,519,000		(331,107,000)	
Papua		148,388,000	3,793,713,630		(713,285,630)	
Maluku Utara		78,722,000	442,410,000		(521,132,000)	
BABEL		37,400,000	821,473,000		(182,150,000)	
Gorontalo		39,318,300	102,132,700		(141,451,000)	
Kepulauan Riau		92,700,000	216,300,000		(309,000,000)	
Papua Barat			1,722,103,000			
Sulawesi Barat		310,058,500	-		(666,913,500)	
<b>TOTAL</b>	<b>8,571,413,091</b>	<b>7,001,950,770</b>	<b>32,530,147,338</b>	<b>(38,102,064)</b>	<b>(29,500,306,444)</b>	<b>18,565,102,691</b>

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2012 :

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

No.	Uraian Peruntukan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	Mata Anggaran Belanja Modal yang Digunakan					Jumlah peruntukkan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan
		532111	533111	533115	533121	536111	
1.	Perolehan/Penambahan K	4,636,184,220	716,946,800	36,223,000	1,562,446,650	50,150,100	7,001,950,770
2.	Pengembangan KDP	18,382,979,408	4,628,067,200	24,600,000	9,313,406,830	181,093,900	32,530,147,338
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>23,019,163,628</b>	<b>5,345,014,000</b>	<b>60,823,000</b>	<b>10,875,853,480</b>	<b>231,244,000</b>	<b>39,532,098,108</b>

**C.3 Piutang Jangka Panjang**

**C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.1.347.250,- dan Rp.0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

tabel 28. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Satker

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Barat	Rp 1.347.250
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.347.250</b>

Sedangkan mutasi (TP/TGR)pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

tabel 29. Mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Satker

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	-
Mutasi tambah:	
- TGR pada Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Barat	Rp 1.347.250
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp 1.347.250</b>

Untuk penjelasan mengenai timbulnya Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada butir C.1.7.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih – Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
Rp.6.736,-

**C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.6.736,- dan Rp0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti .

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti untuk debitur yang tersebut pada tabel 28 :

tabel 30. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	1	1.347.250	-0,50%	(6.736)
<b>Total</b>			<b>1.347.250</b>		<b>(6.736)</b>

Piutang Jangka Panjang  
lainnya Rp.  
8.499.808.374,-

**C.3.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya**

Saldo piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp.8.499.808.374,00 dan Rp 0,- merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

**Penjelasan :**

- Sejak Tahun 2006 s/d Tahun 2009, BKKBN telah mendapatkan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.59.859.000.000,- dengan rincian sbb : Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, Tahun 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- Tahun 2008 sebesar Rp. 23.970.000.000,- dan Tahun 2009 sebesar Rp. 15.925.000.000,-. Pada periode Tahun Anggaran 2006 dan 2007 merupakan belanja bantuan sosial, berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 332/HK.010/F3/2008 tanggal 22 Juli 2008 dana bantuan modal diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS.
- Realisasi jumlah pengiriman dana bantuan modal usaha ke kelompok UPPKS yang berasal dari APBN Pusat dan APBN Provinsi berdasarkan SPM/SP2D pada periode 22 Juli 2008 s/d 31 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 19.670.000.000,-.

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

- Perkembangan pengembalian sisa dana kelompok UPPKS yang sudah disetor ke kas Negara s/d tanggal 24 Desember 2010 adalah Rp. 13.589.568.032,- dari dana sebesar Rp. 19.670.000.000,-, sehingga dana UPPKS yang masih belum dikembalikan sebesar Rp.6.080.431.968,- (out standing) berada di provinsi dan SKPD kab/kota.

Berdasarkan hasil pemetaan I dan II terhadap UPPKS pada Perwakilan BKKBN Provinsi periode 22 Juli 2008 sd. 31 Agustus 2009, maka perkembangan dari piutang bukan pajak sebesar Rp. 6.080.431.968,- adalah sebagai berikut :

- Jumlah Bansos menurut BPK yang menjadi Piutang Negara ..... :Rp. 9.262.102.474,-
- Provinsi yang dana Bansos tidak cair pada mapping II yaitu :
  - Provinsi NTT .....Rp. 32.500.000,-
- Provinsi setor dana ke Kas Negara
  - Lampung.....Rp. 4.715.526,-
  - Sumatera Barat.....Rp. 60.000.000,-
  - NTT.....Rp. 86.204.000,-
  - Riau .....Rp. 25.750.000,-
  - Banten .....Rp. 318.500,-
  - Jawa Tengah .....Rp. 245.596.100,-
  - Sumatera Utara.....Rp. 231.145.000,-
  - Sumatera Selatan .....Rp. 14.100.000,-
  - NTB.....Rp. 47.758.000,-
  - Papua .....Rp. 14.206.974,-
  - Jumlah setor dana ke Kas Negara .....Rp. 729.794.100,-  
:Rp. 762.294.100,-
- **SISA PIUTANG NEGARA .....:Rp. 8.499.808.374,-**

Dari jumlah dana sebesar Rp. 8.499.808.374,- berpotensi menjadi piutang tak tertagih. Dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang ke Kementerian Keuangan.

**C.3.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya**

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar minus Rp.8.499.808.374,00 dan Rp 0,- yang merupakan estimasi atas

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang jangka panjang lainnya (Rp.8.499.808.374,-)

*Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012*

ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– piutang jangka panjang lainnya untuk debitur yang tersebut pada tabel 31 :

tabel 31. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang jangka panjang lainnya

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Macet	1	8,499,808,374	-100.00%	(8,499,808,374)
<b>Total</b>			<b>8,499,808,374</b>		<b>(8,499,808,374)</b>

Aset Lainnya  
Rp.29.516.961.719,-

**C.4 Aset Lainnya**

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.29.516.961.719,00 dan Rp.19.839.398.477,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

tabel 32. Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	per 31 Desember 2012	per 31 Desember 2011
1	Aset Tak Berwujud	Rp 21.769.745.654	Rp 17.073.786.308
2	Aset Lain-Lain	Rp 7.747.216.065	Rp 2.765.612.169
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 29.516.961.719</b>	<b>Rp 19.839.398.477</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp.21.769.745.654,-

**C.4.1 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.21.769.745.654,- dan Rp.17.073.786.308,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

tabel 33. Rincian Aset tak Berwujud per Satker

No.	Unit Satuan Kerja	Nilai
1	Sekretariat Utama (SESTAMA)	Rp 10,522,218,823
2	Deputi Advokasi dan Penggerakan Informasi (ADPIN)	Rp 11,029,081,815
3	Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Barat	Rp 14,400,000
4	Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Tengah	Rp 6,000,000
5	Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Timur	Rp 52,678,116
6	Perwakilan BKKBN Prov. NAD	Rp 11,228,000
7	Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Barat	Rp 14,700,000
8	Perwakilan BKKBN Prov. Sumatera Selatan	Rp 12,428,000
9	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Barat	Rp 8,228,000
10	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Tengah	Rp 8,228,000
11	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Selatan	Rp 18,853,000
12	Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan Timur	Rp 6,713,300
13	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Selatan	Rp 8,228,000
14	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Tenggara	Rp 8,228,000
15	Perwakilan BKKBN Prov. Maluku	Rp 6,713,300
16	Perwakilan BKKBN Prov. Maluku Utara	Rp 2,400,000
17	Perwakilan BKKBN Prov. Bangka Belitung	Rp 8,228,000
18	Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo	Rp 16,250,000
19	Perwakilan BKKBN Prov. Riau	Rp 6,713,300
20	Perwakilan BKKBN Prov. Jambi	Rp 8,228,000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 21,769,745,654</b>

Sedangkan mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

tabel 34. Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tak Berwujud

<b>Saldo per 31 Desember 2011</b>	<b>Rp 17,073,786,308</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Pembelian (Software)	Rp 2,971,268,796
Transfer Masuk (Software)	Rp 85,963,900
Reklasifikasi Masuk (Software)	Rp 350,071,328
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (Software)	Rp 1,724,690,550
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Transfer Keluar (Software)	(85,963,900)
Reklasifikasi Keluar (Software)	(350,071,328)
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp 21,769,745,654</b>

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	Saldo Awal	PEMBELIAN	TRANSFER MASUK	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP	REKLASIFIKASI MASUK	TRANSFER KELUAR	REKLASIFIKASI KELUAR	Saldo Akhir
1	SESTAMA		1,885,290,000		1,638,726,650	341,165,000		(341,165,000)	
2	ADPIN		1,019,136,850			8,906,328		(8,906,328)	
3	DITVOK				85,963,900		(85,963,900)		
4	JABAR		4,400,000						
5	JATIM		48,041,946						
6	ACEH		3,000,000	8,228,000					
7	RIAU			6,713,300					
8	JAMBI			8,228,000					
9	SUMSEL			8,228,000					
10	KALBAR			8,228,000					
11	KALTENG			8,228,000					
12	KALSEL		11,400,000						
13	KALTIM			6,713,300					
14	SULSEL			8,228,000					
15	SULTRA			8,228,000					
16	MALUKU			6,713,300					
17	BABEL			8,228,000					
<b>JUMLAH</b>		<b>17,073,786,308</b>	<b>2,971,268,796</b>	<b>85,963,900</b>	<b>1,724,690,550</b>	<b>350,071,328</b>	<b>(85,963,900)</b>	<b>(350,071,328)</b>	<b>21,769,745,654</b>

Berikut rincian penggunaan/realisasi Belanja Modal dalam rangka penambahan nilai Aset Tak Berwujud periode 1 Januari sd. 31 Desember 2012:

No.	Mata Anggaran	Uraian	Jumlah Peruntukkan Belanja Modal pada Aset Tak Berwujud		Jumlah Belanja Modal
			Lisensi	Software	
<b>BELANJA MAK 532</b>					
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			<b>2,038,095,846</b>
		- Pembelian	643,031,946	1,309,100,000	
		- Penyelesaian Pembangunan KDP		85,963,900	
		<b>JUMLAH BELANJA MODAL (MAK 532)</b>			<b>2,038,095,846</b>
<b>BELANJA MAK 536</b>					
2.	536111	Belanja Modal Lainnya			<b>1,019,136,850</b>
		- Pembelian	173,012,500	846,124,350	
		<b>JUMLAH BELANJA MODAL (MAK 536)</b>			<b>1,019,136,850</b>
		<b>JUMLAH PERUNTUKAN ASET</b>	<b>816,044,446</b>	<b>2,241,188,250</b>	<b>3,057,232,696</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan :

1. Penambahan Pembelian Lisensi sebesar Rp.643.031.946,- dengan menggunakan Belanja Modal MAK 532111 terdapat pada Satuan Kerja :
  - Sekretariat Utama : Rp. 594.990.000,-
  - Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur : Rp. 48.041.946,-

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

2. Penambahan Pembelian Software sebesar Rp.1.309.100.000,- dengan menggunakan Belanja Modal MAK 532111 terdapat pada Satuan Kerja :
  - Sekretariat Utama : Rp. 1.290.300.000,-
  - Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat : Rp. 4.400.000,-
  - Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh : Rp. 3.000.000,-
  - Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan : Rp. 11.400.000,-
3. Penambahan Penyelesaian Pembangunan KDP untuk Software sebesar Rp.85.963.900,- dengan menggunakan Belanja Modal MAK 532111 terdapat pada Satuan Kerja Direktorat Advokasi dan KIE;
4. Penambahan Pembelian Lisensi dan Software, masing-masing sebesar Rp.173.012.500,- dan Rp.846.124.350,- dengan menggunakan Belanja Modal MAK 536111 terdapat pada Satuan Kerja Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi.

Aset Lain-Lain  
Rp.7.747.216.065,-

#### C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.7.747.216.065,- dan Rp.2.765.612.169,- yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Sedangkan mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

tabel 35. Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2011	Rp 2.765.612.169
<b>Mutasi tambah:</b>	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp 9.203.524.845
<b>Mutasi kurang:</b>	
- Penghapusan (BMN) yg dihentikan	(1.843.481.698)
- Reklas Keluar (BMN yg dihentikan)	(143.800.000)
- Koreksi Pencatatan (BMN yg Dihentikan)	(47.575.000)
- Penggunaan Kembali BMN yg sdh dihentikan	(2.187.064.251)
<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp 7.747.216.065</b>

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

Penambahan dan pengurangan aset lain-lain adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA	PENGHAPUSAN	REKLASIFIKASI KELUAR	KOREKSI PENCATATAN	PENGUNAAN KEMBALI BMN YANG SUDAH DIHENTIKAN
1	SESTAMA	978,027,625				
2	JABAR	50,440,005	(210,974,643)			(88,200,000)
3	JATENG	143,998,000	(45,372,000)			
4	DIY	31,500,000				
5	JATIM	1,725,400,186	(10,652,000)	(143,800,000)		(1,428,861,451)
6	SUMUT	217,252,000	(194,300,000)			
7	SUMBAR	187,977,100				
8	RIAU	159,800,000				(79,900,000)
9	JAMBI	372,586,182				
10	SUMSEL	812,598,336				
11	KALBAR	679,590,700	(7,500,000)			(85,761,800)
12	KALTENG	737,369,900	(539,600,000)			
13	KALTIM	206,291,000	(27,637,000)			(15,370,000)
14	SULUT	357,735,600				
15	SULTENG	467,747,500			(47,575,000)	
16	SULSEL	202,577,000	(18,418,000)			
17	MALUKU	101,000,000	(101,000,000)			
18	BALI	38,000,000				(51,340,000)
19	NTT	392,877,300	(268,548,055)			(300,917,000)
20	PAPUA	644,368,985	(419,480,000)			
21	MALUT	58,806,308				
22	BANTEN	120,096,000				
23	BABEL	81,663,200				(700,000)
24	PAPBAR	325,176,800				(136,014,000)
25	SULBAR	110,645,118				
	<b>JUMLAH</b>	<b>9,203,524,845</b>	<b>(1,843,481,698)</b>	<b>(143,800,000)</b>	<b>(47,575,000)</b>	<b>(2,187,064,251)</b>

**KEWAJIBAN**

**C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

**C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga**

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.144.198.073,- dan Rp.223.609.345,- merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek  
Utang kepada Pihak Ketiga Rp.144.198.073,-

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

tabel 36. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian Satker	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Belanja barang yang masih harus dibayar	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Satker
		(212111)	(212112)	(212191)	
1	Perwakilan BKKBN Prov. DIY	1.161.794	19.754.233	-	20.916.027
3	Perwakilan BKKBN Prov. Lampung	-	50.993.750	-	50.993.750
4	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Utara	7.263.663	83.753.479	(40.523.184)	50.493.958
6	Perwakilan BKKBN Prov. NTB	-	3.500.060	-	3.500.060
7	Perwakilan BKKBN Prov. NTT	-	-	1.082.500	1.082.500
8	Perwakilan BKKBN Prov. Papua	348.144	-	-	348.144
9	Perwakilan BKKBN Prov. Bengkulu	-	3.364.600	-	3.364.600
11	Perwakilan BKKBN Prov. Kepulauan Riau	-	-	9.079.989	9.079.989
12	Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Barat	-	4.419.045	-	4.419.045
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun		8.773.601	165.785.167	(30.360.695)	144.198.073

Uang Muka dari KPPN  
Rp. 3.678.008.618,-

### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.3.678.008.618,- dan Rp.6.972.725.190,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang Ditangguhkan  
Rp.1.483.703,-

### C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.1.483.703,- dan Rp.171.005.147,- merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Akun ini merupakan akun penyeimbang Kas di Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Utama sebesar Rp.6.253,- dan Pajak yang belum disetor/Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Satker Perwakilan BKKBN Provinsi DI. Yogyakarta (pada Neraca masuk ke dalam akun Kas Lainnya dan Setara Kas) sebesar Rp.1.477.450,-.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.0,-

### C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp.0,- dan Rp.10.456.764,- merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

**EKUITAS**

Ekuitas Dana Lancar  
Rp.632.429.559.785,-

**C.6 Ekuitas Dana Lancar**

**C.6.1 Cadangan Piutang**

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.1.340.514,- dan Rp.8.499.808.374,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Akun ini merupakan akun penyeimbang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto) sebesar Rp.1.340.514,-.

**C.6.2 Cadangan Persediaan**

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.632.375.797.484,- dan Rp.666.545.768.411,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam bentuk persediaan.

**C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek**

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp.144.198.073,- dan minus Rp.234.066.109,-. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Akun ini merupakan akun penyeimbang Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.144.198.073,-.

**C.6.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya**

Ekuitas Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp.141.586.527,- dan Rp.196.840.506,-. Ekuitas Dana Lancar Lainnya merupakan penyeimbang Kas dan Setara Kas Lainnya pada kelompok Aset Lancar dan merupakan sisa dana hibah luar negeri (UNFPA) pada satker KBKR yang akan digulirkan/diluncurkan kembali pada tahun anggaran 2013.

**C.6.5 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima**

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 55.033.333,- dan Rp. 0,-. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan dari kepada pihak lain.

**C.7 Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi  
Rp.974.291.680.160,-

**C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp.944.773.377.927,- dan Rp.896.352.559.330,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap

**C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.29.518.302.233,- dan Rp.19.839.398.477,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

Akun ini merupakan penyeimbang akun Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto) sebesar Rp.1.340.514,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.29.516.961.719,-

## **D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

### **D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK**

Berdasarkan temuan Badan pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan Keuangan BKKBN Tahun Anggaran 2012 terkait penatausahaan Barang Milik Negara dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur  
Terdapat realisasi belanja barang (MAK 52) yang digunakan untuk membeli aset (peralatan dan Mesin) senilai Rp. 7.700.000,- yang belum dikapitalisasi ke dalam Neraca dengan rincian sebagai berikut :
  - Pembelian kabel PC 500 meter senilai Rp. 1.400.000,- , instalasi Rp. 500.000,- , Kabel KU 20 PIN senilai Rp. 2.750.000,- dan terminal Box LSA senilai Rp. 350.000,- dalam kegiatan optimalisasi pemanfaatan telephone PABX berbasis TIK menggunakan MAK 521219, SPJ senilai Rp. 5.000.000 untuk pemasangan jaringan dibayar dengan SPM No. 00462 tgl. 29/10/2012 Sp2D No.710111U tgl. 30/10/2012.
  - Pembelian printer Epson L800 senilai Rp. 2.700.000,- dalam kegiatan optimalisasi pemanfaatan telepon PABX berbasis TIK menggunakan MAK 521219, SPJ senilai Rp. 4.900.000,- untuk printer dibayar SPM no. 00505 tgl. 28/11/2012 dan SP2D No. 725159Y tgl. 30/11/2012  
Terhadap temuan ini telah dilakukan koreksi ke dalam aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan menu "*Pembelian*" per tanggal 31 Desember 2012.
- b. Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan  
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja, diketahui terdapat realisasi belanja di Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) dengan memakai kelompok akun yang tidak sesuai sebagai berikut:
  - Pembelian meja belajar sebanyak 20 unit @Rp225.000,00 total senilai Rp4.500.000,00. SPJ dan kuitansi pembelian tertanggal 8 Agustus 2012.
  - Pembelian kursi lipat sebanyak 30 unit @Rp145.000,00 total senilai Rp4.350.000,00. SPJ dan kuitansi pembelian tertanggal 6 Agustus 2012.
  - Pembelian Printer Canon IP 2770 sebanyak 1 unit senilai Rp400.000,00. SPJ dan kuitansi pembelian tertanggal 10 Januari 2012.
  - Pembelian meja karyawan sebanyak 2 unit @Rp322.500,00 total senilai Rp645.000,00. SPJ dan kuitansi tertanggal 6 Juli 2012
- c. Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja hibah, terdapat pembelanjaan aset yang belum tercatat di Neraca BKKBN tahun 2012

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012

senilai Rp. 99.200.000,-. Aset tersebut telah diserahkan kepada beberapa universitas dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerima Aset hibah	BMN yg diserahkan	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)
1	Univ. Negeri Papua-	Komputer	2	14,000,000
		UPS	2	1,500,000
		Printer	1	2,500,000
		Viewer	1	5,000,000
		Ongkos Kirim	1	1,800,000
2	Univ. Sumut-	Komputer	2	14,000,000
		UPS	2	1,500,000
		Printer	1	2,500,000
		Viewer	1	5,000,000
		Ongkos kirim	1	1,800,000
3	Univ. Cendrawasih-	Komputer	2	14,000,000
		UPS	2	1,500,000
		Printer	1	2,500,000
		Viewer	1	5,000,000
		Ongkos kirim	1	1,800,000
4	Univ. Nusa Cendana-	Komputer	2	14,000,000
		UPS	2	1,500,000
		Printer	1	2,500,000
		Viewer	1	5,000,000
		Ongkos kirim	1	1,800,000
				99,200,000

Penginventarisasian barang yang dibeli dari dana hibah tidak dapat dilakukan langsung oleh BKKBN sesuai dengan surat perjanjian kerjasama/letter of Understanding (LoU) UNFPA-BKKBN yang menyatakan bahwa aset yang dibeli dari dana hibah baru dapat diakui sebagai aset BKKBN setelah periode kontrak kerjasama (LoU) berakhir.

Aset tersebut belum dapat di catat dalam Neraca dikarenakan belum ada BAST (berita acara serah terima).

d. Kehilangan Aset tetap berupa peralatan dan mesin pada beberapa Satker BKKBN :

- Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung kehilangan Laptop Lenovo Thinkpad perolehan tahun 2008 senilai Rp. 8.148.800,00
- Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara kehilangan 7 unit laptop dan 2 unit Notebook dengan total nilai Rp. 91.287.600,00
- Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh kehilangan Laptop Lenovo G470-641 perolehan tahun 2011 senilai Rp. 8.000.000,00
- Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau kehilangan laptop sebanyak 2 unit perolehan tahun 2010 senilai Rp. 38.700.000,00
- Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat kehilangan laptop merk axioo perolehan tahun 2008 senilai Rp. 4.694.500,00

Saat ini sedang dalam proses usulan penilaian Tim TGR/TP untuk segera dilakukan TGR kepada penanggung jawab BMN tersebut.

Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2011 sebagaimana dalam lampiran.

**D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL**

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran .

**D.4 REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagaimana terlampir.

**D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Masih terdapat pagu minus pada belanja pegawai di satker Sestama dan satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang proses revisi pagu minus ke kementerian keuangan.

**Badan Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Nasional**

**Pt. K e p a l a,**

**DR. Sudibyo Alimoeso, MA**  
**NIP.19551129 197902 1 001**